



PEMERINTAH
KABUPATEN
BELITUNG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan

Rencana....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengelaran sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB....

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan.
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat.
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
 2. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
 3. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung;
 4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung;
 5. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung;
 6. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
 7. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
 8. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
 9. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
 10. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;

11. Rencana...

11. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
12. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
14. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
15. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
16. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
17. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
18. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
19. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
20. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung;
21. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
22. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
23. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung;
24. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;
25. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
26. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;
27. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpandan;
28. Rencana Strategis Kecamatan Badau;
29. Rencana Strategis Kecamatan Sijuk;
30. Rencana Strategis Kecamatan Membalong;
31. Rencana Strategis Kecamatan Selat Nasik;

(3)Renstra...

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, maka dapat diselesaikannya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029, kebijakan pembangunan nasional, serta isu-isu strategis daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat daerah lain, lembaga legislatif,



maupun pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang telah diberikan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang jelas, terarah, dan implementatif, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tanjungpandan, 12 September 2025

Kepala Dinas,



EDI USDIANTO, ST
NIP. 19750518 200112 1 004



DAFTAR ISI

		hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar	Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan		4
1.3. Maksud dan Tujuan		7
1.3.1. Maksud		7
1.3.2. Tujuan		8
1.4. Sistematika Penulisan		8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		
PERANGKAT DAERAH		11
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah		11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah		11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah		20
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia		20
2.1.2.2. Sumber Daya Aset/Modal		24
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		27
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah		40
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah		41
2.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		45
2.4 Isu Strategis Perangkat daerah		47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		49
3.1 Tujuan dan Sasaran		49
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah		52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		56
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah		56
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan		113



BAB V PENUTUP 117

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025	20
Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan	22
Tabel 2.3 Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir	23
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN DPUPR Tahun 2025 yang Telah Mengikuti Diklat ..	24
Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPUPR Kabupaten Belitung	24
Tabel 2.6.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018 – 2023	28
.....	
Tabel 2.6.b Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023	31
Tabel 2.6.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2024-2026	33
Tabel 2.7.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023.....	35
Tabel 2.7.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023.....	37
Tabel 2.7.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2024-2026.....	39
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas PUPR	47
Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 -2030	51
Tabel 3.2 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	52
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	53
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	53
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPUPR Kabupaten Belitung	58



Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	71
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	115
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	115



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

		hal
Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lain	4
Gambar 2.1	Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung	12
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai DPUPR Tahun 2025	22
Gambar 2.3	Persentase SDM berdasarkan tingkat pendidikan	23
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	49
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan di tingkat perangkat daerah terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah



yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah, acuan dalam pembuatan rencana kerja, menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, serta untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perangkat daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

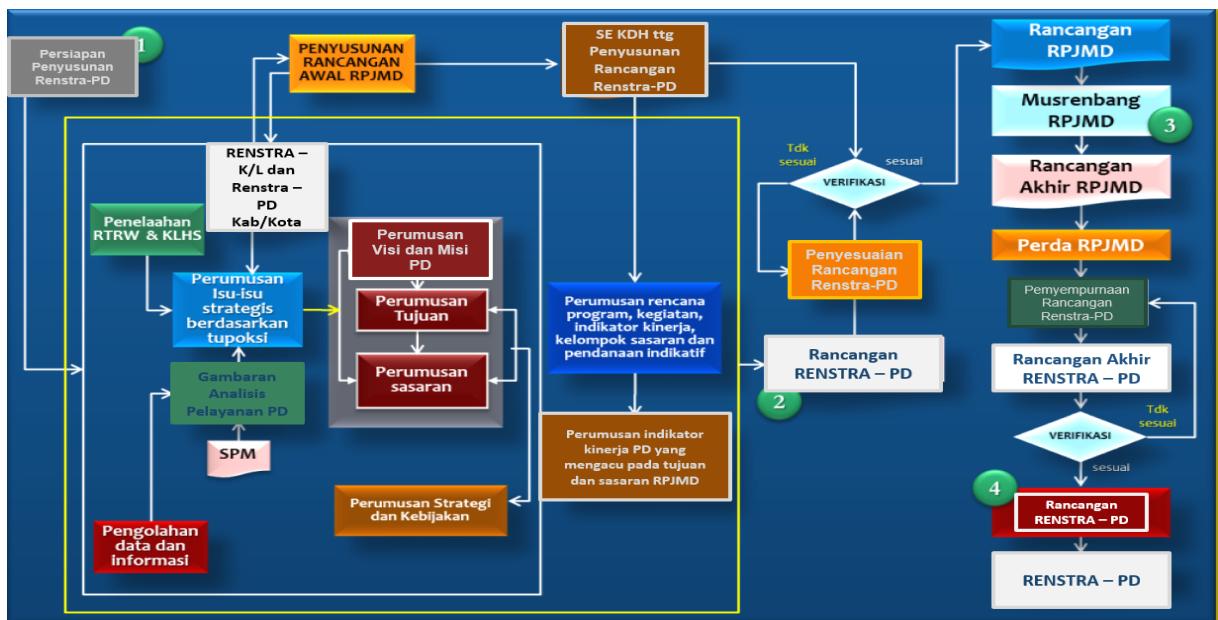
Rencana Strategis disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana

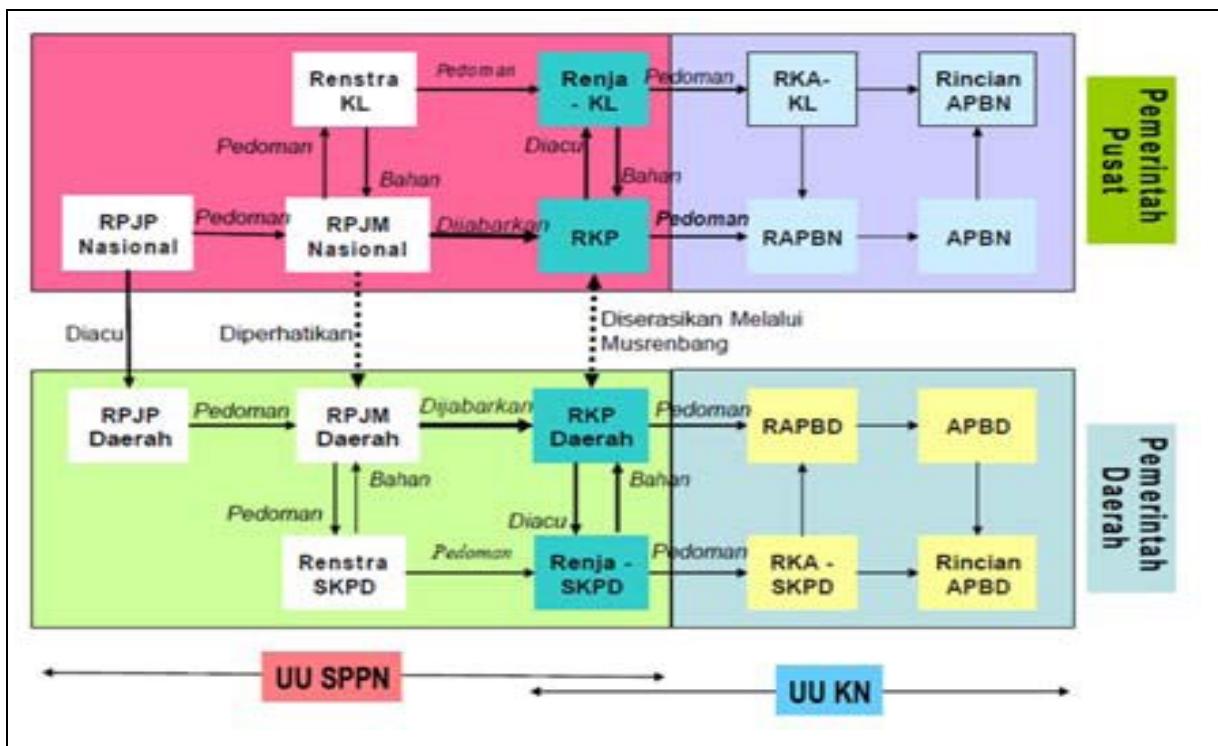


Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung disusun dengan memperhatikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah periode 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaahan terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra).



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antar dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lain

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan atau landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran



Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Belitung Tahun 2023-2027.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Renstra ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Renstra berfungsi untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan bidang PUPR.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.



3. Menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.
4. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.3.2. TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung bertujuan untuk:

- a. Merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan bidang PUPR yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Menyediakan kerangka perencanaan yang jelas, sistematis, dan terukur bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, permukiman, sumber daya air, persampahan, air minum, sanitasi, serta penataan ruang.
- c. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD, Renja) serta penganggaran (KUA-PPAS, APBD).
- d. Mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja layanan pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah serta permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah serta memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Tanjungpandan periode 2025- 2029. Selain itu juga memuat uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Perikanan tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).



BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

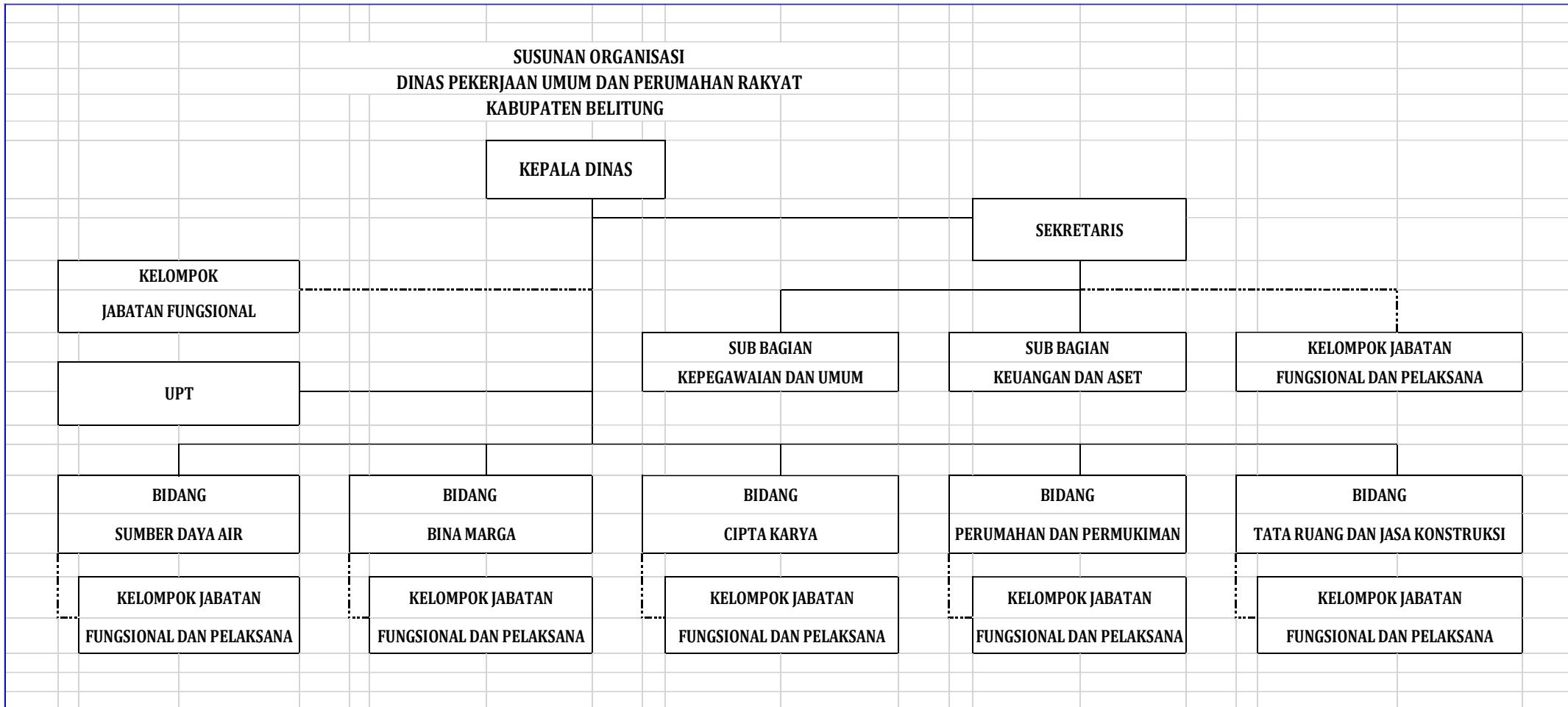
2.1. GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung



Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 2.1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2.3. Sub Koordinator Keuangan dan Aset
 - 2.4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Sumber Daya Air
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Cipta karya
6. Bidang Perumahan dan Permukiman
7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
8. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium
9. UPT Pengelolaan Air Minum
10. Kelompok jabatan Fungsional

1. Kepala Badan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Untuk



melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundangundangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- f. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- g. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;



- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;



- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan



koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasana Perbekalan, dan Laboratorium

UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;



- b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM)

UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT PAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT PAM;
- b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana prasarana pendukungnya;
- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit PAM yang di distribusikan kepada para pelanggan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT PAM;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Belitung pada Februari 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 49 pegawai, yang terdiri dari 35 pegawai laki-laki (71,43%) dan 14 pegawai perempuan (28,57%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 45 orang (91,84%), sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 4 orang (8,16%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan gambar 2.2.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	-	
2	Sekretaris	1	-	
	1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	-	
	2. Kasubbag Keuangan dan Aset	-	1	
	3. Perencana Muda	1	-	
	4. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	
	5. Bendahara	-	5	
	6. Arsiparis	-	1	
	8. Non ASN	3	1	
3	Kepala Sumber Daya Air	1	-	
	1. Teknik Pengairan Muda	1	1	
	2. Analis Pengelolaan SDA	1	-	
	3. Pengelola SDA	-	1	
	4. Pengawas Irigasi	-	1	
	5. Non ASN	1	-	
4	Kepala Bidang Bina Marga	1	-	
	1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1	-	

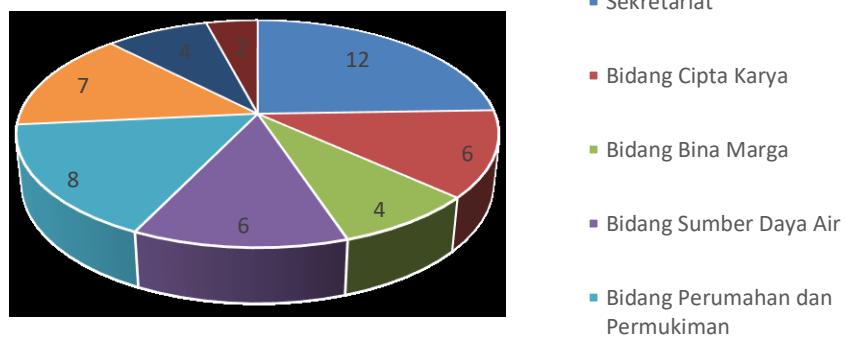


	2. Pengawas Jalan dan Jembatan	1	-	
	3. Pranata Pengelola Legger Jalan	1	-	
	4. Non ASN	-	2	
5	Kepala Bidang Cipta Karya	1	-	
	1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	-	1	
	2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	-	
	3. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	-	
	4. Pengawas Jaringan Utilitas	1	-	
	5. Pengawas Bangunan dan Gedung	1	-	
	6. Non ASN	3	1	
6	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	1	-	
	1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	2	-	
	2. Pengawas Bangunan dan Gedung	1	-	
	3. Pengelola Perumahan dan Permukiman	2	-	
	4. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	
	5. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan		1	
	6. Non ASN	20	4	
7	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi	1	-	
	1. Surveyor Pemetaan Pertama	1	-	
	2. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	2	-	
	3. Pembina Jasa Konstruksi Muda	1		
	4. Pengelola Tata Ruang	1	-	
	5. Penyusun Rencana Tata Ruang	1	-	
8	Kepala UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium	-	1	
	1. Kasubbag TU UPT Sarana Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium	1	-	
	2. Penguji Laboratorium Tanah aspal dan Beton	1	-	
	3. Penguji Bahan dan Bangunan	1	-	
9	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	1	-	
	1. Kasubbag TU UPT PAM	1	-	
	2. Non ASN	22	2	
Jumlah		85	26	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025



Gambar 2.2 Kompoisis Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025



Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan

Rincian	Jumlah ASN		Jumlah CASN		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	5	-	-	-	5
Gol. III	26	11	-	-	37
Gol. II	2	1	-	-	3
Gol. I	-	-	-	-	-
Gol. IX	2	1	-	-	3
Gol. VII	-	1	-	-	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan gambar 2.3.

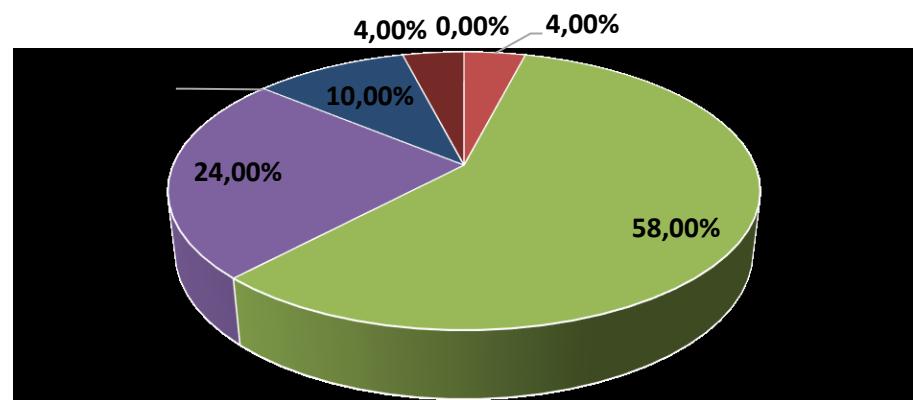


Tabel 2.3. Jumlah SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Golongan ASN/CASN	Pendidikan Terakhir																			
	S 3		S 2		S 1		D IV		D III		D II		D I		SMA		SMK		SMP	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ASN Gol. IV	-		2		3		1		-		-		-		-		-		-	-
ASN Gol. III	-		-		14	6	2		9	1	-		-		2	3	-	1		-
ASN Gol. II	-		-		-		-		1	1	-		-		-		-	1	-	
ASN Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ASN Go. IX					2	1														
ASN Gol. VII									1											
CPNS Gol. IV	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
CPNS Gol. III	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
CPNS Gol. II	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
CPNS Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
Jumlah	-		2		19	6	3		10	3	-		-		2	3	-	1	1	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Gambar 2.3. Persentase SDM berdasarkan tingkat pendidikan



■ S.3 ■ S.2 ■ S.1/D4 ■ D3 ■ D2 ■ D1 ■ SMA/Sederajat ■ SMP/Sederajat



Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Tahun 2025 yang Telah Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai		Yang telah mengikuti dan lulus	Yang belum mengikuti
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	2	0	2	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1	0	1	-
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	1	2	-
4	Diklat Fungsional	0	0	0	-
5	Diklat Barang dan Jasa	19	1	20	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

2.1.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada saat ini dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

NO	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket.
ALAT BESAR									
1	Crawler Excavator + Attachment		1			1			
2	Stamper		2			2			
3	Concrete Cutter		1			1			
4	Concrete Vibrator		1			1			
KOMPUTER									
1	Internet		1			1			
2	P.C Unit		72			72			
3	Lap Top		15			15			
4	Note Book		17			17			
5	Tablet PC		4			4			
6	Personal Komputer lainnya		1			1			
7	Hard Disk		6			6			
8	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)		2			2			
9	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		1			1			
10	CPU (Peralatan Personal Komputer)		2		1	1			



11	Monitor	11		11			
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	62		62			
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6		6			
14	Peralatan Personal Komputer lainnya	6		6			
15	Server	2		2			
16	Peralatan Komputer lainnya	7		7			
	ALAT KESELAMATAN KERJA	1		1			
1	Tenda	1		1			
	RAMBU - RAMBU	273		273			
1	Rambu Jalan	268		268			
2	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	5		5			
	ALAT ANGKUTAN	36					
1	Station Wagon	1		1			
2	Sport Utility Vehicle (SUV)	1		1			
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		1			
4	Truck + Attachment	1		1			
5	Pick Up	10	3	7			
6	Sepeda Motor	17	4	13			
7	Mobil Tangki Air	3		3			
8	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2		2			
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	35		35			
1	Mesin Gerinda	1		1			
2	Mesin Bor Tangan	1		1			
3	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1		1			
4	Gergaji Chain Saw	2		2			
5	peralatan las lainnya (dst)	3		3			
6	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1		1			
7	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1		1			
8	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	1		1			
9	Kunci Khusus Moment	3		3			
10	Rol Meter	2		2			
11	Global Positioning System	18		18			
12	Desicator (Size) 3	1		1			
	ALAT PERTANIAN	7		7			
1	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1		1			
2	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1		1			
3	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	3		3			
4	Lemari Penyimpan	2		2			
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	486	6	480			
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2		2			
2	Mesin Ketik Listrik	1		1			
3	Lemari Besi/Metal	7		7			
4	Lemari Kayu	7		7			
5	Filing Cabinet Besi	29	1	28			
6	Brandkas	3		3			
7	Lemari Kaca	11	3	8			



8	CCTV - Camera Control Television System	28		28		
9	Alat Penghancur Kertas	9		9		
10	Mesin Absensi	1		1		
11	Alat Pengaman / Sinyal	18		18		
12	LCD Projector/Infocus	2		2		
13	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	6		6		
14	Alat Kantor Lainnya	1		1		
15	Meja Kerja Besi/Metal	6		6		
16	Meja Kerja Kayu	18		18		
17	Kursi Besi/Metal	44		44		
18	Kursi Kayu	10		10		
19	Meja Rapat	7		7		
20	Meja 1/2 Biro	50		50		
21	Kursi Tamu	7		7		
22	Kursi Putar	27		27		
23	Sofa	4		4		
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1		
25	Mesin Pemotong Rumput	18	2	8		
26	Mesin Cuci	1		1		
27	Alat Pembersih lainnya	15		15		
28	Lemari Es	1		1		
29	A.C. Sentral	1		1		
30	A.C. Window	9		9		
31	A.C. Split	41		41		
32	Televisi	6		6		
33	Amplifier	1		1		
34	Loudspeaker	1		1		
35	Unit Power Supply	14		14		
36	Camera Video	45		45		
37	Tangga Aluminium	1		1		
38	Dispenser	5		5		
39	Mimbar/Podium	1		1		
40	Handy Cam	1		1		
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21		21		
42	Alat Pemadam/Portable	2		2		
43	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1		1		
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2		2		
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		28	1	27		
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7		7		
2	peralatan studio audio lainnya (dst)	3		3		
3	Camera Electronic	1		1		
4	Film Projector	1		1		
5	Layar Film/Projector	3		3		
6	Camera Digital	5		5		
7	Trestirial Camera	1		1		
8	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	1	1		
9	Level	1		1		
10	Kamera Udara	1		1		



11	Alat Studio Pemetaan lainnya	1			1			
12	Handy Talky (HT)	3			3			
13	Facsimile	1			1			
	ALAT LABORATORIUM	78		2	76			
1	Timbangan Elektronik	1			1			
2	Test Press/Strenght Test	1			1			
3	Saw Machine For Concret	1			1			
4	Concreta Mixer/Penumbuk Beton	1			1			
5	Concrete Hammer Set	3			3			
6	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	2		2				
7	Cbr Lab. Set Cl.284	1			1			
8	alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	22			22			
9	Exstoder/Extruder	1			1			
10	Unconfined Air & Manometer	1			1			
11	Soil Test	2			2			
12	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	1			1			
13	Field Scale	1			1			
14	Alat Uji Tekan Hydrotastic	1			1			
15	Drying Oven	1			1			
16	Video Printer	2			2			
17	Sand Sample & Sand Container	1			1			
18	Distiling Apparatus	3			3			
19	Hand Penetrometer	1			1			
20	Specify Gravity Balance System	1			1			
21	Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi)	1			1			
22	Meja Kerja	6			6			
23	Cetak Kubus Beton	20			20			
24	Digital Analitical Balance	1			1			
25	Surface Rounghnes Measuring Device	1			1			
26	Automatic Dispenser	1			1			

Sumber : Dinas PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kab. Belitung, 2025

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 serta Tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sesuai fungsi pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.6.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian Tahun Ke						
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN																					
1	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak				n/a	55,87%						51,93%									
2	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah				n/a	70,04%						68,39%									
INDIKATOR PROGRAM																					
1	Persentase peningkatan cakupan pelayanan air minum	✓			77,00%						78,98%					102,57					
2	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	✓				78,00%						80,48%					103,18				
3	Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	✓			53,00%						53,88%					101,66					
4	Persentase jalan lingkungan yang tertangani					29,85%						15,87%					53,17				
5	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik					61,30%						66,75%					108,89				
6	Persentase pengolahan air limbah permukiman	✓				54,00%						53,88%					99,78				
7	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman				100,00%						100,00%					100					
8	Persentase Luasan Permukiman Kumuh	✓			24,91%	15,39%					16,76%	6,78%				132,72	155,92				
9	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	✓				100,00%						100,00%					100				
10	Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara				100,00%						100,00%					100					
11	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar				11,90%	17,40%					11,95%	13,06%				100,42	75,06				

12	Percentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan				10,00%	15,00%				10,00%	10,00%				100	66,67				
13	Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100				
14	Percentase Taman Terkelola				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100				
15	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Terampil dan Teknisi Konstruksi Sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)				100,00%					100,00%					100					
16	Percentase Tenaga Terampil Bersertifikat Kontruksi					53,00%					76,13%					143,64				
17	Percentase Jalan Kabupaten yang Memenuhi Standar				41,00%					38,78%					94,59					
18	Percentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik		✓		76,00%	76,00%				76,00%	88,09%				100	115,91				
19	Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan				480.00 Km					523.98 Km										
20	Percentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				100,00%					100,00%					100					
21	Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan				100.00 M					22.00 M										
22	Percentase Sawah Terairi Irigasi		✓		54,26%	54,72%				52,10%	54,02%				96,02	98,72				
23	Percentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani				6,52%	26,50%				7,18%	10,07%				110,12	38				
24	Percentase Drainase Sekunder dalam Kondisi Baik				46,85%	59,35%				50,57%	62,22%				107,94	104,84				
25	Percentase Sumber Air Baku yang Terkelola dengan baik					12,00%					11,76%					98				
26	Dokumen Tata Ruang				2 Dok	3 dok				2 Dok	0				100	-				
27	Dokumen Tata Ruang yang Telah diperdakan					1 dok					0					-	-			
28	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang				100,00%					100,00%					100					
29	Percentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang		✓		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100				
30	Ketaatan Terhadap RTRW				100,00%	100,00%				100,00%	97,60%				100	97,6				
31	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100				

32	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
33	Meningkatnya Disiplin Aparatur				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
34	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Menigkat Kompetensinya Sesuai Bidangnya				100,00%					100,00%					100				
35	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan					100,00%					100,00%					100			
36	Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel				100,00%					100,00%					100				
37	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah					100,00%					100,00%					100			
38	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				100,00%					100,00%					100				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Tabel 2.6.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian Tahun Ke					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
I	Indikator Tujuan dan Sasaran																			
1	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak		✓					53,54%	55,36%	56,97%				55,57%	58,64%	63,61%			103,79	
2	Rasio permukiman layak huni		✓					99,65%	99,75%	100,00%				99,73%	99,79%	99,93%			100,08	
3	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah		✓					70,55%	70,79%	71,08%				69,23%	65,74%	66,18 %			98,13	
4	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)							75,00	75,00	75,00				77,50	79,22%	86,12%			103,33	
II	Indikator Program																			
1	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan		✓					81,00%						81,85%					101,05	
2	Persentase penduduk dengan akses air minum yang layak		✓						82,09%	83,16%					82,78%	83,29%				100,84
3	Persentase pengolahan air limbah pemukiman							53,98%	54,14%	54,30%				54,04%	54,79%	54,79 %			100,11	
4	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik							15,50%	18,83%	22,15%				15,83%	20,02%	23,04 %			102,13	
5	Persentase jalan lingkungan yang tertangani		✓					18,59%						22,64%					121,79	
6	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar							14,46%	15,86%	17,26%				14,25%	14,82%	16,21 %			98,55	
7	Persentase Tertatinya Bangunan dan Lingkungan		✓					12,50%	15,00%	17,50%				n/a	15,00%				100,00	
8	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		✓					60,00%	60,00%	60,00%				70,00%	90,00%	90,00%			116,67	
9	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni							100,00%						-					0,00	
10	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana							67,00%	100,00%					0,00	0,00				0,00	

11	Percentase Luasan kawasan kumuh					85,77%				52,60%						61,33			
12	Percentase pengurangan Luasan kawasan kumuh						80,77%	0,00%			33,45%	28,69%				41,41	71,04		
13	Percentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh					99,32%	99,51%	99,80%			99,66%	99,93%				100,15	99,93		
14	Percentase taman terkelola					100,00%				100,00%						100,00			
15	persentase PSU yang dikelola						53,60%	66,29%			44,90%	47,26%				83,77	71,29		
16	Percentase jalan kabupaten dalam kondisi baik					76,00%													
17	Percentase jalan mantap kabupaten					72,32%	72,55%	72,78%			70,88%	66,95%	67,76%			98,01	92,28	93,10	
18	Percentase sumber daya air yang terkelola dengan baik					36,61%	41,54%	45,10%			40,57%	43,03%	48,02%			110,82	103,59	106,47	
19	Percentase penyelenggaraan penataan ruang		v			100,00%	100,00%	100,00%			98,03%	98,24%	97,26%			98,03	98,24	97,26	
20	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00	100,00	100,00	
	2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah					75,00	75,00	75,00			77,50%		77,75%			103		104	
	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00	100,00	100,00	
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00	100,00	100,00	

Tabel 2.6.c. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Pencapaian Tahun Ke			
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I	Indikator Tujuan dan Sasaran													
1	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman				45,34%	46,55%	47,96%	45,35%			100,02			
2	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an				26,17%	27,57%	29,36%	25,57%			97,71			
3	Pemenuhan PSU Permukiman				64,52%	65,54%	66,56%	65,14%			100,96			
II	Indikator Program													
1	Percentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik				49,91%	52,82%	57,03%	48,44%			97,05			
2	Percentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman				18,30%	19,75%	21,51%	18,65%			101,91			
3	Percentase Jumlah Rumah dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik				8,20%	8,69%	9,16%	7,69%			93,78			
4	Percentase drainase lingkungan dalam kondisi baik				22,00%	29,59%	39,57%	21,54%			97,91			
5	Percentase Jalan Standar Kabupaten				28,25%	29,00%	29,76%	27,50%			97,35			
6	Percentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar				4,79%	5,22%	5,64%	4,58%			95,62			
7	Percentase Tertatinya Bangunan dan Lingkungan				33,33%	46,67%	60,00%	0,00%			0,00			
8	Percentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				60,00%	60,00%	60,00%	60,00%			100,00			
9	Percentase penyelenggaraan penataan ruang				100,00%	100,00%	100,00%	92,09%			92,09			
10	Percentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh				99,80%	99,82%	99,84%	99,93%			100,13			
11	persentase PSU yang dikelola				66,02%	69,84%	73,66%	48,42%			73,34			
12	Percentase penyediaan rumah layak huni korban bencana				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%			0,00			
13	Percentase pengurangan Luasan kawasan kumuh				0,20%	0,8=18%	0,16%	0,00%			0,00			

14	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00		
	2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				67,00%	69,00%	71,00%	78,67%			117,42		
	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00		
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Tabel 2.7.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023

No	Uraian		Anggaran Tahun 2019-2020*					Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020**					Rasio antara realiasi dan anggaran ***					Rata-rata Pertumbuhan ****	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
1	Program	Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	8.731,73					8.178,26					93,66						
2	Program	Penyediaan dan Pengelolaan Air minum		10.190,64					6.108,96					59,95					
3	Program	Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1.554,04					1.517,21					97,63						
4	Program	Pengembangan Infrastruktur Permukiman		5.593,50					5.458,82					97,59					
		-Persentase Jalan Lingkungan yang Tertangani		3.940,50					3.889,63					98,71					
		-Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik		1.623,00					1.569,19					96,68					
		-Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman		30					-					-					
5	Program	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	17.538,50					15.264,61					87,03						
6	Program	Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh		4.295,11					4.046,99					94,22					
7	Program	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	-	-				-	-				-	-					
8	Program	Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	5.478,08					5.013,78					91,52						
9	Program	Pengembangan dan Penataan Bangunan		2.538,12					2.431,02					95,78					
		-Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar		688,12					585,08					85,03					
		-Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara		1.600,00					1.597,26					99,83					
		-Persentase Tertatinya Bangunan dan Lingkungan		250					248,68					99,47					

10	Program	Pengembangan dan Penataan Taman	3.292,74	1.859,89				3.184,88	1.783,72				96,72	95,9				
11	Program	Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi	236	5				199,39	4,9				84,49	97,94				
12	Program	Pengembangan Jalan dan Jembatan	60.751,36					60.238,30					99,16					
13	Program	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		64.617,72					63.392,64					98,1				
14	Program	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	42.050,90					41.812,64					99,43					
15	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.295,20					1.201,99					92,8					
16	Program	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.027,43	4.519,24				4.826,83	4.210,63				96,01	93,17				
17	Program	Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	1.877,44	675				1.869,57	673,05				99,58	99,71				
18	Program	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	5.851,38	2.505,00				5.827,34	2.496,19				99,59	99,65				
19	Program	Pengelolaan Sumber Air Baku		125					124,61					99,68				
20	Program	Perencanaan Tata Ruang	648,62	37,88				621,56	35				95,83	92,41				
		-Dokumen Tata Ruang		-					-									
		-Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan		37,88					35					92,41				
21	Program	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	330,66	72,25				248,94	51,73				75,28	71,6				
		-Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang		37,25					32,56					87,4				
		-Ketaatan Terhadap RTRW		35					19,18					54,79				
22	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.395,20	1.022,18				1.250,27	753,42				89,61	73,71				
23	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.266,54	533,55				1.149,82	404,99				90,78	75,9				
24	Program	Peningkatan Disiplin Aparatur	28	19,6				27,97	19,56				99,88	99,79				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Tabel 2.7.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2018-2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021-2023*					Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023**					Rasio antara realiasi dan anggaran ***					Rata-rata Pertumbuhan ****	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			6.586,73	5.983,96	4.688,19			5.636,11	5.775,13	2.921,07			85,57	94,92	62,69		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			1.703,70	4.285,07	940,00			1.703,20	4.272,50	295,33			99,97	99,71	31,57		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			799,32	840,00	680,00			790,44	1.037,32	678,58			98,89	99,74	99,79		
4	Program Pengembangan Permukiman			5.598,18					5.087,75					90,88				
5	Program Penataan Bangunan Gedung			6.032,50	2.585,00	15.312,00			5.351,39	2.906,93	14.044,10			88,71	88,49	97,36		
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				312,00					306,04					98,09			
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi			165,64	181,07	239,96			97,78	124,31	196,81			59,03	68,85	82,16		
8	Program Pengembangan Perumahan			130,00	254,50	154,50			-	99,81	0,00			0,00	39,22	0,00		
9	Program Kawasan Permukiman			2.181,24	303,55	535,55			1.902,53	241,12	123,42			87,22	74,52	58,82		
10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				1.563,40	1.101,83				1.562,40	1.099,49				99,94	99,79		
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			1.768,18	7.336,79	14.326,01			1.704,17	1.562,40	12.653,46			96,38	96,97	90,09		
12	Program Penyelenggaraan Jalan			75.188,79	78.206,95	57.896,64			67.755,43	70.140,54	48.930,27			90,11	85,55	84,82		
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			5.981,13	4.485,20	3.660,94			5.644,90	4.767,65	3.498,73			94,38	99,63	95,77		
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.655,14	1.802,60	773,62			1.308,42	1.283,95	749,60			79,05	75,91	97,12		

15	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.815,33	9.641,22	9.852,15			8.223,66	9.153,63	9.153,63			93,29	92,91	92,91	
----	---------	---	--	--	----------	----------	----------	--	--	----------	----------	----------	--	--	-------	-------	-------	--

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

Tabel 2.7.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode 2024-2026

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024-2026			Realisasi Anggaran Tahun 2024-2026			Rasio antara realiasi dan anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350			4.973.542.490			97,16				
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000			1.050.259.800			99,90				
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	694.710.000			693.614.500			99,84				
5	Program Penataan Bangunan Gedung	13.474.485.000			12.984.741.300			96,37				
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0			0			0,00				
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	755.219.400			688.060.410			91,11				
8	Program Pengembangan Perumahan	83.946.803			0			0,00				
10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000			605.084.000			99,39				
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.375.683.650			6.204.784.036			97,32				
12	Program Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598			27.886.494.473			89,87				
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.210.442.886			2.075.728.700			93,91				
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000			293.079.556			91,94				
15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.518.913.378			7.917.242.734			75,27				

Sumber : Dinas PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kab. Belitung, 2025

Dari penjelasan Tabel 2.6.c untuk kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan kinerja untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode Tahun 2024-2026, dimana merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai rencana strategis transisi dalam masa pemilihan kepala daerah. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 untuk pencapaian yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an Tahun 2024 yaitu 25,57% dari target yang ditetapkan sebesar 26,17%, dengan pencapaian sebesar 97,71%. Pencapaian indikator yang tidak mencapai target dikarenakan adanya kegiatan didalam program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud tidak mendapat angaran karena membutuhkan anggaran yang cukup besar sementara kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi serta tidak adanya bantuan dari pusat dalam bentuk Dana alokasi Khusus. Meskipun pencapaian indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2024 sedikit di bawah target, hal ini menunjukkan bahwa Dinas PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kabupaten Belitung telah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan pencapaian indikator ini dapat meningkat di masa mendatang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pencapaian indikator pemenuhan PSU permukiman Tahun 2024 yaitu 65,14% dari target yang ditetapkan sebesar 64,52% dengan capaian sebesar 100,97%. Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan efektivitas program permukiman, dimana adanya perencanaan yang terintegrasi yang disesuaikan dengan keuangan daerah serta koordinasi lintas sektoral dalam mendukung percepatan pembangunan PSU.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun



2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, maka Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran yaitu :

1. Masyarakat Umum;
2. Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah;
3. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta;
5. Aparat Desa dan Kelurahan.

2.2. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air:

1. Mengoptimalkan potensi sumber air baku permukaan seperti ex kolong tambang timah yang tersebar di setiap kecamatan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku domestik (keperluan rumah tangga), industri dan irigasi.
2. Bagaimana melindungi sumber air baku permukaan ini dari peruntukan ruang yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan sekitarnya.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan



4. Mengoptimalkan pengelolaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten.
5. Membangun bangunan pengendali banjir.

Peluang Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

1. Pelaksanaan kegiatan irigasi adanya sharing dari instansi Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung.
2. Sumber daya manusia yang kompeten.

Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga:

1. Memperdayakan SDM secara Optimal dalam Pencapaian Kinerja KeBinaMargaan
2. Mengoptimalkan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan.
3. Mengoptimalkan Aplikasi Perencanaan baik di tingkat perencanaan pusat (KRISNA) maupun daerah (SIPD).
4. Mengoptimalkan Koordinasi antara Fungsi perencanaan dan Penganggaran.
5. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Peluang Pembangunan Bidang Bina Marga:

1. Adanya Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dan Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. SDM yang memiliki Kompetensi.
4. Tersedianya Tenaga Fungsional tertentu.

Tantangan Pembangunan Bidang Cipta Karya, meliputi:

1. Memberdayakan SDM aparatur secara optimal pencapaian kinerja Bidang Cipta Karya.
2. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam membantu perencanaan dan penyusunan data base Bidang Cipta Karya.



3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pemenuhan kebutuhan air minum dan Penyediaan pelayanan pengelolaan Pengelolaan Limbah domestik.
4. Ketersediaan tenaga ahli atau tenaga konsultan PBG yang berbiaya terjangkau.
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Belitung.
6. Penyusunan peraturan bupati tentang retribusi terkait SPAM.

Peluang Pembangunan Bidang Cipta Karya:

1. Mendukung Program Inovatif dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung yang menekankan tentang keandalan bangunan gedung.
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rincana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2044.
5. Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029.
6. Dokumen Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029.
7. Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahun 2025-2029.

Tantangan Pembangunan Bidang Perumahan Permukiman, meliputi:

1. Belum adanya konsep perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman daerah yang terintegrasi.
2. Masih kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan/taman kota/taman publik.
3. Belum tersedianya data inventarisasi PSU skala lingkungan.
4. Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan MBR.
5. Belum tercapainya 0% kawasan kumuh.
6. Belum jelasnya data Rumah Tidak Layak Huni.

Peluang Pembangunan Bidang Perumahan Permukiman, meliputi:

1. Adanya UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



2. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan taman perkotaan.
3. Kewenangan penanganan rumah akibat bencana menjadi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten.

Tantangan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, meliputi:

Tantangan Tata Ruang:

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Mendorong efektivitas pemanfaatan dan kesesuaian ruang.
3. Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Tantangan Jasa Konstruksi meliputi:

1. Transformasi pengelolaan layanan jasa konstruksi secara digital.
2. Meningkatkan ketersediaan tenaga konstruksi bersertifikat.
3. Pengawasan terhadap tertib usaha jasa konstruksi.
4. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi.

Peluang Tata Ruang

1. Tersedianya peraturan terkait dengan RTRW dan RDTR.
2. Kemudahan akses informasi mengenai tata ruang.
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi.

Tantangan Sekretariat Dinas meliputi:

1. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.
2. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.



3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan OPD) dan antar pelaku pembangunan.

Peluang Sekretariat Dinas meliputi:

1. Tersedianya tenaga fungsional tertentu dan fungsional lainnya.
2. Program yang dilaksanakan oleh bidang Sekretariat merupakan program rutin yang memiliki standar SOP yang jelas.
3. Adanya transformasi digital yang memudahkan koordinasi antar tingkatan (sekretariat-bidang internal OPD, sekretariat-sekretariat OPD lainnya).

2.3 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 77 tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu fungsi penunjang urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun permasalahan inti sebagai berikut:



1. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baik kegiatan bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Kabupaten Belitung dengan potensi pariwisata yang mendunia merupakan salah satu destinasi prioritas. Dalam wilayah Kabupaten Belitung terdapat KSPN Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Kelayang, dan Belitung UNESCO Global Geopark. Untuk mendukung kegiatan pariwisata dibutuhkan koneksi antar destinasi wisata yang melengkapi seluruh wilayah kabupaten serta aksesibilitas kedalam destinasi wisata itu sendiri. Selain daripada itu untuk mendukung kegiatan pariwisata dibutuhkan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Ketersediaan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata memerlukan ketersediaan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan peruntukan ruang.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana permukiman yang layak huni. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan terutama dikawasan perkotaan. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk perumahan mengurangi penyediakan ruang terbuka hijau sebagai daerah serapan air. Pembangunan perumahan swadaya yang tanpa perencanaan dan pengelolaan kawasan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan ketidakteraturan bangunan. Kemiskinan penduduk menyebabkan sulitnya mendapat rumah yang layak sehingga masyarakat hanya dapat menghuni rumah yang tidak layak. Faktor-faktor ini mendorong timbulnya kawasan kumuh di area perkotaan.



Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan dan layanan infrastruktur wilayah yang belum optimal	Belum optimalnya infrastruktur kePUan	Pengelolaan sumber daya air belum optimal Belum terpenuhinya Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi Belum optimalnya pelayanan Jalan kabupaten Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan mutu kontruksi
		Belum optimalnya infrastruktur permukiman	Belum optimalnya sarana dan prasarana umum permukiman Berkembangnya kawasan kumuh perkotaan Masih banyaknya pengembang perumahan yang Belum menyerahkan PSU perumahan

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

2.4 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis perangkat daerah merupakan permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian serius, karena memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, kondisi aktual pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan nasional maupun provinsi.

Bagi perangkat daerah, isu strategis tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan internal (anggaran, sumber daya manusia, maupun tata kelola), namun juga faktor eksternal seperti perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika lingkungan, hingga kebijakan regulasi yang lebih luas. Dengan demikian, isu strategis



menjadi landasan dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas perangkat daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur wilayah, penyediaan layanan dasar, serta pengendalian tata ruang. Dalam lima tahun ke depan, tantangan pembangunan terus berkembang, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, maupun perubahan iklim dan teknologi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar program dan kegiatan yang disusun tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Potensi Daerah Yang Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pariwisata, Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan	1. Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah 2. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman 3. Masih Kurangnya SDM	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Tujuan Pembangunan BerkelaJutan (SDGs)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas	1. Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas 2. Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Wilayah	1. Peningkatan Akses Dan Konektivitas Infrastruktur 2. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Permukiman 3. Penanganan Kawasan Kumuh Dan Permukiman Tidak Layak 4. Pengembangan dan Penguatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung, 2025

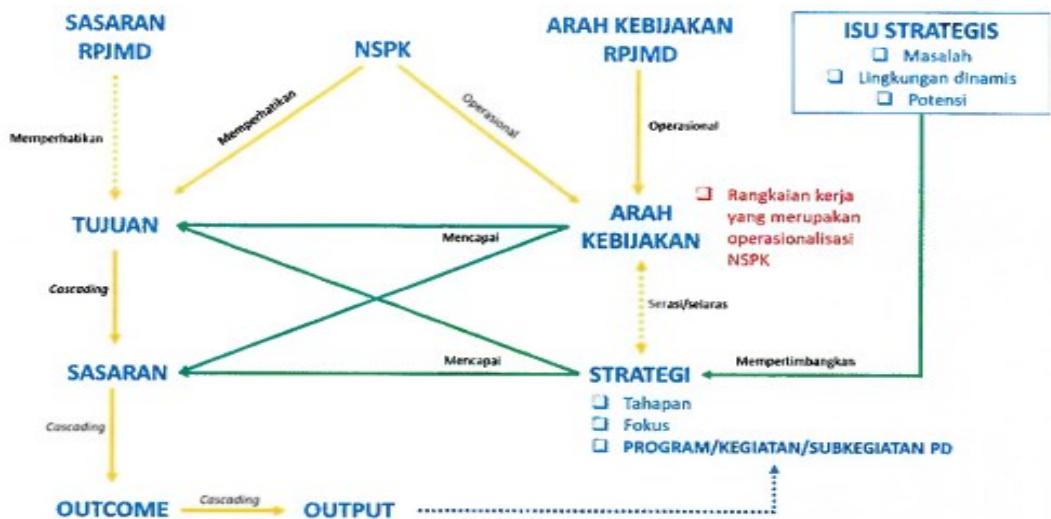


BAB III

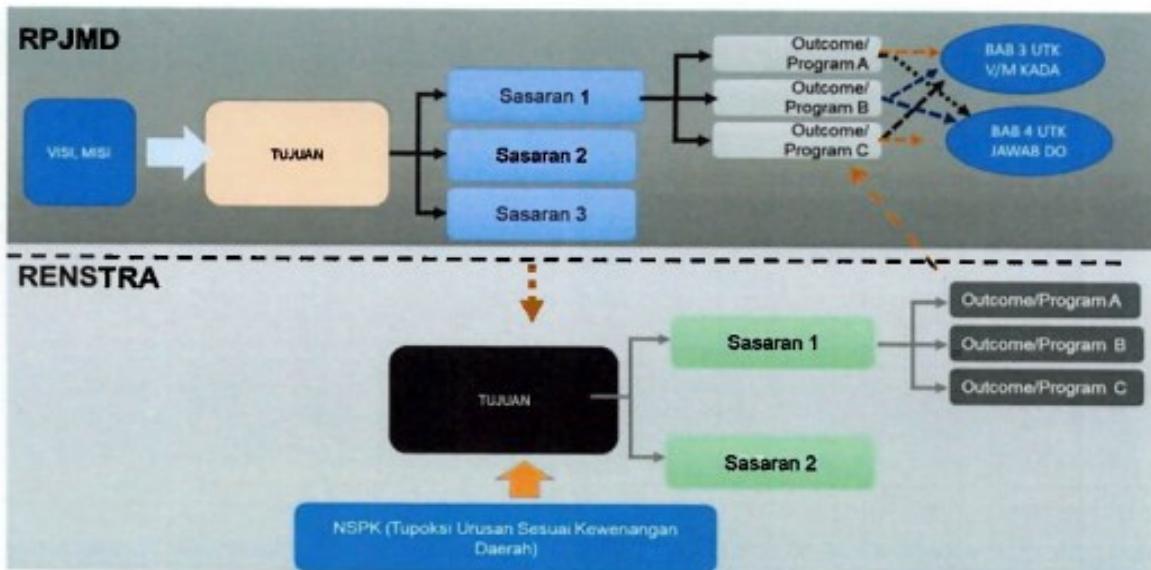
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan arah pembangunan jangka menengah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang terukur, berorientasi hasil, serta sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus mendukung realisasi visi dan misi Kepala Daerah. Hubungan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memiliki mandat penting dalam penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah serta mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menetapkan sejumlah **tujuan dan sasaran strategis** sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan 2025–2029.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 berdasarkan pada sasaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-20230

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tersedianya Infrastruktur Inklusif Berkualitas yang dan	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelaanjutan		Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	44,73	53,02	55,31	57,68	60,32	62,78	Rumusan: $(0,8 \times \text{Indeks Infrastruktur ke-PU-an}) + (0,2 \times \text{Indeks Infrastruktur Permukiman})$
		Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	41,96	50,38	51,83	53,21	54,94	56,45	$(0,3 \times \text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten}) + (0,2 \times \text{sumber daya air terkelola dengan baik}) + (0,3 \times \text{terkelolanya keciptakaryaan dengan baik}) + (0,1 \times \text{penataan ruang}) + (0,1 \times \text{penyelenggaraan jasa konstruksi})$
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	55,85	63,58	69,26	75,55	81,84	88,07	$(0,4 \times \text{jalan lingkungan}) + (0,3 \times \text{RTH}) + (0,1 \times \text{RTLH}) + (0,05 \times \text{RLH korban bencana}) + (0,05 \times \text{RLH bagi korban relokasi program kabupaten}) + (0,1 \times \text{Pengurangan Kawasan Kumuh})$



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis. Keduanya saling berkaitan dan harus dijalankan secara konsisten, dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, ketersediaan sumber daya, serta arahan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Perumusan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Strategi Dinas Pekerjaan Uumum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Strategi RPJMD	Strategi Renstra	KET.
1.	Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif	1. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air.	
2.	Pemerataan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan Kawasan strategis	2. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. 3. Peningkatan akses dan cakupan layanan air minum, sanitasi, dan drainase. 4. Penguatan penataan ruang. 5. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi. 6. Peningkatan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman. 7. Penanganan dan Pencegahan kawasan kumuh.	

Pentahapan Rencana Strategis merupakan kerangka waktu pelaksanaan strategi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam periode tahunan selama lima tahun. Pentahapan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi antara tujuan jangka menengah dengan rencana tahunan (Renja), serta



sebagai mekanisme pengendalian pencapaian kinerja perangkat daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra
 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar & Rehabilitasi Infrastruktur Eksisting	Perluasan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur	Tersedianya layanan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan serta strategis, maka dirumuskan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	KET.
1	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Peningkatan akses infrastruktur dasar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sumber air baku yang terlindungi baik sumber air baku untuk irigasi, kebutuhan domestik (rumah tangga) dan industri 2. meningkatkan pengendalian sumber daya air dan penanganan banjir 3. Meningkatkan pengamanan pantai dan pemeliharaan alur sungai kewenangan kabupaten 4. Meningkatkan jaringan irigasi 5. peningkatan standar jalan kabupaten 6. mempertahankan kinerja jalan mantap kabupaten 	



			<ul style="list-style-type: none"> 7. peningkatan jalan non-status menjadi jalan kabupaten 8. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum 9. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah 10. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan 	
2		Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman dan perumahan 2. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah 3. Pengurangan kawasan kumuh 4. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 	
3		Peningkatan infrastruktur konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. peningkatan standar jalan kabupaten 2. mempertahankan kinerja jalan mantap kabupaten 3. peningkatan jalan non-status menjadi jalan kabupaten 	
4		Penyedian dan pengelolaan infrastruktur perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian infrastruktur kawasan perkotaan 2. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau / pertamanan 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif 	
5		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan perkada tata ruang, membuat RDTR, dan peraturan zonasi Wilayah Kabupaten 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 	
6		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses ke Tempat pembuangan sampah 2. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah 4. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan 	
7		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketalahan bencana dan iklim	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan PBG 2. Meningkatkan Penataan Bangunan dan lingkungan 3. Meningkatkan pelayanan dasar jasa konstruksi tingkat kabupaten 4. Meningkatkan mutu konstruksi 	



8		Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di Kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada kawasan strategis2. Penataan kawasan strategis3. Peningkatan prasarana di kawasan strategis	
9		Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur antar wilayah2. Pengembangan dan peningkatan konektivitas infrastruktur antar wilayah3. Peningkatan sistem prasarana terpadu antar wilayah	

Sumber : Hasil Analisis, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai instrumen operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMD, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rencana program, kegiatan, subkegiatan serta pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2025–2029 yang disertai dengan outcome maupun indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan subkegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.



Secara harfiah, Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah dalam jangka menengah lima tahunan. Setiap program dilaksanakan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan serta seubkegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan dan subkegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian indikator program dan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Kegiatan juga menjadi dasar bagi penyusunan subkegiatan dan penetapan kebutuhan anggaran tahunan. Dengan demikian, kegiatan memiliki peran penting sebagai jembatan antara **program (level strategis)** dan **subkegiatan (level operasional)**.

Subkegiatan merupakan **rincian operasional dari kegiatan** yang menghasilkan keluaran (output) spesifik dalam satu tahun anggaran. Subkegiatan menjadi unit terkecil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, serta menjadi dasar penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** perangkat daerah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang terukur, serta memastikan keterpaduan antara aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan					Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman		
		Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an				Indeks Infrastruktur ke-PU-an		
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Persentase Dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		
						Nilai Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		
						Nilai Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
						Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Lap hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	
						Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
						Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tersusunnya Dokumen keuangan dan aset perangkat daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	penerima layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah penerima layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappnya	
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya keperluan administrasi umum perangkat daerah	jenis penyediaan keperluan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan keperluan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dok Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Jumlah Lap penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang milik daerah	Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Urusan Penunjang pemerintah Daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
						Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah kendaraan perorangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya air				Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
			Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase Sekunder	Saluran Drainase Sekunder dalam Kondisi Baik	Percentase Saluran Drainase Sekunder dalam Kondisi Baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Pembangunan Stasiun Pompa banjir	
						Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
						Jumlah Dok Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
						Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direrstorasi	Normalisasi/Restorasi Sungai	
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
						Panjang Breakwater yang Dibangun	Pembangunan Breakwater	
						Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Peningkatan Tanggul Sungai	
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
						Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Pembangunan Unit Air Baku	
						Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Unit Air Baku	
						Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
						Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
						Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
						Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
						Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
						Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
						Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung	
						Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
				Meningkatnya Kualitas Sistem irigasi	Saluran irigasi yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran irigasi yang berfungsi dengan baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	
						Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dipertkuat Kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang Terkoordinasi, Sinkron dan Terlaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya Akses Layanan Air Minum			Percentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum yang aman	Rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
			Meningkatnya Keberfungsian Tempat Pengelolaan Persampahan Regional		Percentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
				TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi	Jumlah TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
					Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
			Meningkatnya Ketersediaan Layanan Sanitasi		Percentase rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
				Rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	Jumlah rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota		
					Teroptimisasinya instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas drainase			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Meningkatnya kapasitas saluran drainase	Saluran drainase	Panjang Saluran drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung			Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar	Penataan Bangunan dan Gedung	
				Meningkatnya bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/SLF)	Bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/SLF)	Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/SLF)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Legalitas Bangunan Gedung	
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dok Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggarannya	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilok, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilok, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungannya				Percentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Tersedianya dokumen penataan bangunan dan lingkungan	Dokumen penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dok Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
					Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
					Jumlah Dok Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas jalan			Percentase Jalan Mantap Kabupaten		Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik dan sedang	Jalan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dok Leger Jalan yang Dikelola		Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang jalan yang dibangun		Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dibangun		Pembangunan Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi				Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		
			Meningkatnya kompetensi dasar tenaga terampil konstruksi melalui pelatihan bersertifikat	Tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota	Laporan sistem informasi jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Laporan sistem Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
						Jumlah Dok Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
			Tersedianya laporan hasil pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan hasil pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah laporan hasil pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penyelenggaraan Penataan Ruang				Persentase Penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
						Persentase Kesesuaian Tata Ruang		
			Meningkatnya kepastian hukum, keterpaduan pembangunan, dan kualitas pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota	Dokumen tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dok Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
						Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dok administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
						Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
						Dok persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
						Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang legal dan berkualitas	Dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
						Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
				Tersedia Jumlah Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
						Jumlah Dok sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dok Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
						Dok teksual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman				Indeks Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Layanan Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah			Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana		
						Persentase Penyediaan Rumah layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program pemerintah	Pengembangan Perumahan	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Dokumen Perencanaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pendaatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
						Jumlah Dok Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan	
						Jumlah Dok data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
						Jumlah Dok data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau Masyarakat yang di Relokasi	Rumah layak huni bagi korban bencana atau Masyarakat yang di Relokasi	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
						Jumlah Lap Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Menurunnya Kawasan Kumuh			Persentase Luasan kawasan kumuh	Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
					Jumlah Lap Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum		
			Tersedianya dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh	Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
			Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
					Dok pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh		
			Meningkatnya Rumah Layak Huni		Persentase Rumah Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Meningkatnya kualitas hunian masyarakat melalui pengurangan rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		Persentase PSU dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap PSU	PSU yang dikelola	Luasan PSU yang dikelola	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
						Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
						Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
						Jumlah Lap Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					80.838.555.850,00		363.198.009.000,00		279.993.569.000,00		194.007.092.000,00		219.977.773.000,00					
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.058.783.535,00		11.353.691.000,00		11.574.491.000,00		12.074.312.000,00		12.129.285.000,00					
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100	10.058.783.535,00	100	11.353.691.000,00	100	11.574.491.000,00	100	12.074.312.000,00	100	12.129.285.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Percentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100						
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		85		90		95		100						
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		85		90		95		100						
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	78,21	79,80	80,15		80,93		81,20		81,87		82,56						
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		5.000.000,00		5.400.000,00		5.800.000,00		6.200.000,00					
Tersusunnya Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	4	0,00	4	5.000.000,00	4	5.400.000,00	1	5.800.000,00	1	6.200.000,00					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	2		2		2		2		2								
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1								
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	2	0,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00							
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		500.000,00		550.000,00		600.000,00		650.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	600.000,00	1	650.000,00							
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		500.000,00		550.000,00		600.000,00		650.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	600.000,00	1	650.000,00							
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00		500.000,00		550.000,00		600.000,00		650.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	600.000,00	1	650.000,00							
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0,00		500.000,00		550.000,00		600.000,00		650.000,00		Tanjung Pandan					
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	600.000,00	1	650.000,00							
1.03.01.2.01.0006 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	4	0,00	4	2.000.000,00	4	2.100.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.122.526.035,00		9.224.026.000,00		9.324.226.000,00		9.424.426.000,00		9.524.626.000,00							
Tersusunnya Dokumen keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	50	51	9.122.526.035,00	51	9.224.026.000,00	51	9.324.226.000,00	51	9.424.426.000,00	51	9.524.626.000,00							
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1								
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.122.526.035,00		9.222.526.000,00		9.322.526.000,00		9.422.526.000,00		9.522.526.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	50	51	9.122.526.035,00	51	9.222.526.000,00	51	9.322.526.000,00	51	9.422.526.000,00	51	9.522.526.000,00							
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00		500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	0,00	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00							
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	2	0,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00							
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0,00		50.750.000,00		50.863.000,00		51.000.000,00		51.140.000,00							
Tersusunnya Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)				0,00	1	50.750.000,00	1	50.863.000,00	1	51.000.000,00	1	51.140.000,00							
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)					1				1		1								
1.03.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)				0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0,00		750.000,00		863.000,00		1.000.000,00		1.140.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)				0,00	1	750.000,00	1	863.000,00	1	1.000.000,00	1	1.140.000,00							
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00		178.250.000,00		211.250.000,00		185.800.000,00		250.800.000,00							
Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		0,00	1	178.250.000,00	1	211.250.000,00	1	185.800.000,00	1	250.800.000,00							
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1					1												
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	19			10		12		10		15								
1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		0,00		0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		0,00							
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		38.250.000,00		38.250.000,00		40.800.000,00		40.800.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		0,00	1	38.250.000,00	1	38.250.000,00	1	40.800.000,00	1	40.800.000,00							
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		140.000.000,00		168.000.000,00		140.000.000,00		210.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	19		0,00	10	140.000.000,00	12	168.000.000,00	10	140.000.000,00	15	210.000.000,00							
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					406.422.900,00		489.073.000,00		536.101.000,00		598.921.000,00		686.232.000,00							
Tersedianya keperluan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		406.422.900,00	1	489.073.000,00	1	536.101.000,00	1	598.921.000,00	1	686.232.000,00							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	4		4		4		4		4								
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1								
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.598.000,00		50.578.000,00		55.636.000,00		61.200.000,00		67.320.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	4.598.000,00	1	50.578.000,00	1	55.636.000,00	1	61.200.000,00	1	67.320.000,00							
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.148.700,00		45.693.000,00		59.402.000,00		77.222.000,00		100.389.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	35.148.700,00	1	45.693.000,00	1	59.402.000,00	1	77.222.000,00	1	100.389.000,00							
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00		5.000.000,00		5.250.000,00		5.500.000,00		5.750.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		0,00	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.500.000,00	1	5.750.000,00							
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					132.900.000,00		146.190.000,00		160.809.000,00		176.890.000,00		194.579.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	132.900.000,00	1	146.190.000,00	1	160.809.000,00	1	176.890.000,00	1	194.579.000,00							
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.842.000,00		17.224.000,00		30.142.000,00		52.747.000,00		92.308.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	9.842.000,00	1	17.224.000,00	1	30.142.000,00	1	52.747.000,00	1	92.308.000,00							
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.058.700,00		9.512.000,00		9.986.000,00		10.486.000,00		11.010.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	9.058.700,00	1	9.512.000,00	1	9.986.000,00	1	10.486.000,00	1	11.010.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					214.875.500,00		214.876.000,00		214.876.000,00		214.876.000,00		214.876.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	4	214.875.500,00	4	214.876.000,00	4	214.876.000,00	4	214.876.000,00	4	214.876.000,00							
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		408.000.000,00		400.000.000,00		705.000.000,00		440.000.000,00							
Tersedianya Barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		0,00	1	408.000.000,00	1	400.000.000,00	1	705.000.000,00	1	440.000.000,00							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6			12		5		7		6								
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			2				2		1		2								
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	3			2				2		2								
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		70.000.000,00		350.000.000,00		70.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2		0,00		0,00	2	70.000.000,00	1	350.000.000,00	2	70.000.000,00							
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		60.000.000,00		0,00		60.000.000,00		60.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	3		0,00	2	60.000.000,00		0,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00							
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		148.000.000,00		130.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6		0,00	12	148.000.000,00	5	130.000.000,00	7	95.000.000,00	6	110.000.000,00							
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					310.534.600,00		390.542.000,00		442.901.000,00		503.915.000,00		575.137.000,00							
Tersedianya Penyediaan Urusan Penunjang pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4	310.534.600,00	4	390.542.000,00	4	442.901.000,00	4	503.915.000,00	4	575.137.000,00							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4		4		4		4		4								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12			4		4		4		4								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	4		4		4		4		4								
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00							
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.577.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4	165.000.000,00	4	181.500.000,00	4	199.650.000,00	4	219.615.000,00	4	241.577.000,00							
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		0,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00							
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					142.534.600,00		171.042.000,00		205.251.000,00		246.300.000,00		295.560.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4	142.534.600,00	4	171.042.000,00	4	205.251.000,00	4	246.300.000,00	4	295.560.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					219.300.000,00		608.050.000,00		603.750.000,00		599.450.000,00		595.150.000,00							
Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				219.300.000,00	1	608.050.000,00	1	603.750.000,00	1	599.450.000,00	1	595.150.000,00							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	21		21		21		21		21								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	4		4		4		4		4								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1			1		1		1		1								
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	80	80			80		80		80		80								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	65			65		65		65		65								
	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					68.617.000,00		68.617.000,00		68.617.000,00		68.617.000,00		68.617.000,00	KAB. BELITUNG					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	4	68.617.000,00	4	68.617.000,00	4	68.617.000,00	4	68.617.000,00	4	68.617.000,00							
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					150.683.000,00		150.683.000,00		150.683.000,00		150.683.000,00		150.683.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	21	150.683.000,00	21	150.683.000,00	21	150.683.000,00	21	150.683.000,00	21	150.683.000,00							
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	80	80		0,00	80	40.000.000,00	80	40.000.000,00	80	40.000.000,00	80	40.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		48.750.000,00		44.450.000,00		40.150.000,00		35.850.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	65		0,00	65	48.750.000,00	65	44.450.000,00	65	40.150.000,00	65	35.850.000,00							
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00							
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00							
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.179.222.440,00		5.941.227.000,00		5.871.288.000,00		6.562.523.000,00		6.746.812.000,00							
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Percentase sumber daya air yang terkelola dengan baik (%)	-	22,15	22,58	2.179.222.440,00	23,00	5.941.227.000,00	23,43	5.871.288.000,00	23,86	6.562.523.000,00	24,29	6.746.812.000,00	1.03.1.04.0.0.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum						
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.141.453.500,00		4.004.683.000,00		3.842.589.000,00		4.432.453.000,00		4.505.236.000,00							
Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase Sekunder	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)				1.141.453.500,00		4.004.683.000,00		3.842.589.000,00		4.432.453.000,00	1	4.505.236.000,00							
Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)												1								
Panjang Tangul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	0,283		0,068			0,07		0,072		0,074		0,077								
Panjang Tangul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	0,06		0,04			0,04		0,04		0,04		0,04								
Panjang Tangul Sungai yang Dibangun (KM)						2							1							
Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)																				
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)																				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)									1										
	Jumlah Lembar Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)					1		1		1		1								
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)					1		1		1		1								
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)					1		1		1		1								
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	3				4		4		3		3								
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)					1														
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)					1		1		1										
	Panjang Tangul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		3,000	1,280		3,900		3,900		3,900		3,900								
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)					0,2		0,2		0,2		0,2								
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)							0,150		0,150		0,150								
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)					0,060		61		62		62								
	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)					0,03		0,03		0,03		0,03								
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)					0,10		0,130		0,130		0,130								
	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)							1		1		1								
	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)					5		5		5		5								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	1								1			1							
	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	1		1		1		1		1								
1.03.02.2.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir					0,00		0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)				0,00		0,00		0,00		0,00	1	200.000.000,00							
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					0,00		0,00		0,00		120.000.000,00		0,00		KAB. BELITUNG					
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)				0,00		0,00		0,00	1	120.000.000,00		0,00							
1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota					39.240.000,00		39.305.000,00		39.370.000,00		39.435.000,00		39.435.000,00		KAB. BELITUNG					
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	39.240.000,00	1	39.305.000,00	1	39.370.000,00	1	39.435.000,00	1	39.435.000,00							
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)				0,00	0,2	200.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,2	200.000.000,00		KAB. BELITUNG					
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		Tanjung Pandan					
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)				0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	TARGET	PAGU												
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					810.000.000,00		834.300.000,00		859.329.000,00		885.109.000,00		911.662.000,00		KAB. BELITUNG		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		3,000	1,280	810.000.000,00	3,900	834.300.000,00	3,900	859.329.000,00	3,900	885.109.000,00	3,900	911.662.000,00				
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya					0,00		394.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)				0,00	1	394.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00				
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai					0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)				0,00		0,00	0,150	200.000.000,00	0,150	200.000.000,00	0,150	200.000.000,00				
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					0,00		200.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)				0,00	0,10	200.000.000,00	0,130	320.000.000,00	0,130	320.000.000,00	0,150	350.000.000,00				
1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater					0,00		190.000.000,00		19.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)				0,00	0,03	190.000.000,00	0,03	19.000.000,00	0,03	190.000.000,00	0,03	190.000.000,00				
1.03.02.2.01.0103 - Peningkatan Tanggul Sungai					162.207.900,00		167.073.000,00		172.085.000,00		177.248.000,00		182.565.000,00		KAB. BELITUNG		
Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	0,283	0,068	162.207.900,00	0,07	167.073.000,00	0,072	172.085.000,00	0,074	177.248.000,00	0,077	182.565.000,00					
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					0,00		140.000.000,00		142.800.000,00		145.656.000,00		148.569.000,00		KAB. BELITUNG		
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)				0,00	0,060	140.000.000,00	61	142.800.000,00	62	145.656.000,00	0,064	148.569.000,00				
1.03.02.2.01.0107 - Pembangunan Unit Air Baku					0,00		0,00		0,00		170.000.000,00		195.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)				0,00		0,00		0,00	1	170.000.000,00	1	195.000.000,00				
1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku					0,00		0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)				0,00		0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tangul Sungai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	KAB. BELITUNG				
Terbangunnya Tangul Sungai	Panjang Tangul Sungai yang Dibangun (KM)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)				0,00	2	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai					0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	3			0,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00							
1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		198.000.000,00	KAB. BELITUNG				
Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)				0,00		0,00		0,00		0,00	1	198.000.000,00							
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					0,00		0,00		0,00		195.000.000,00		0,00		KAB. BELITUNG					
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)				0,00		0,00		0,00	1	195.000.000,00		0,00							
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tangul Sungai					130.005.600,00		130.005.000,00		130.005.000,00		130.005.000,00		130.005.000,00		KAB. BELITUNG					
Terehabilitasinya Tangul Sungai	Panjang Tangul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	0,06		0,04	130.005.600,00	0,04	130.005.000,00	0,04	130.005.000,00	0,04	130.005.000,00	0,04	130.005.000,00							
1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00	KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					0,00		100.000.000,00			0,00		0,00		0,00		KAB. BELITUNG			
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00			0,00		0,00		0,00					
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung					0,00		120.000.000,00			120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		KAB. BELITUNG			
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)				0,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00				
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku					0,00		750.000.000,00			750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		KAB. BELITUNG			
Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)				0,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00				
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.037.768.940,00		1.936.544.000,00			2.028.699.000,00		2.130.070.000,00		2.241.576.000,00					
Meningkatnya Kualitas Sistem irigasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan (Rekomendasi)				1.037.768.940,00	1	1.936.544.000,00	1		2.028.699.000,00	1	2.130.070.000,00	1	2.241.576.000,00					
	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,49		0,05		0,06		0,061		0,07		0,06							
	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,125		0,181		0,20		0,219		0,24		0,27							
	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,224				0,220		0,220		0,220		0,220							
	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,731		0,20		0,22		0,24		0,266		0,29							
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irrigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5	0	2		8		8		8		8		1					
	Jumlah Lembaga Pengelola Irrigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)					1		1						1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	TARGET	PAGU												
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.02.2.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					147.630.000,00		162.393.000,00		178.632.000,00		196.496.000,00		216.145.000,00		KAB. BELITUNG		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0,49		0,05	147.630.000,00	0,06	162.393.000,00	0,061	178.632.000,00	0,07	196.496.000,00	0,06	216.145.000,00				
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,224			0,00	0,220	180.000.000,00	0,220	180.000.000,00	0,220	180.000.000,00	0,220	180.000.000,00				
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					557.492.940,00		613.241.000,00		674.565.000,00		742.022.000,00		816.224.000,00		KAB. BELITUNG		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,125		0,181	557.492.940,00	0,20	613.241.000,00	0,219	674.565.000,00	0,24	742.022.000,00	0,27	816.224.000,00				
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					132.646.000,00		145.910.000,00		160.502.000,00		176.552.000,00		194.207.000,00		KAB. BELITUNG		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,731		0,20	132.646.000,00	0,22	145.910.000,00	0,24	160.502.000,00	0,266	176.552.000,00	0,29	194.207.000,00				
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)				0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
1.03.02.2.02.0047 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi					0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanaan (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanaan (Rekomendasi)				0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa					200.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5	0	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLaan DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENyEDIAAN AIR MINUM					7.863.064.374,00		15.095.500.000,00		16.077.250.000,00		16.758.000.000,00		17.566.000.000,00						
Meningkatnya Akses Layanan Air Minum	Percentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman (%)	18,07	16,56	17,81	7.863.064.374,00	20,84	15.095.500.000,00	23,87	16.077.250.000,00	26,90	16.758.000.000,00	29,94	17.566.000.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					7.863.064.374,00		15.095.500.000,00		16.077.250.000,00		16.758.000.000,00		17.566.000.000,00						
Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum yang aman	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		2	7.863.064.374,00	2	15.095.500.000,00	3	16.077.250.000,00	1	16.758.000.000,00	1	17.566.000.000,00						
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)			1		1		1		1		1							
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	532		817		1.834		1.883		1.933		1.985							
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	17		9		9		9		9		9							
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					450.000.000,00		850.000.000,00		650.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		2	450.000.000,00	2	850.000.000,00	3	650.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00						
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					2.046.234.374,00		3.000.000.000,00		3.600.000.000,00		3.960.000.000,00		4.356.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	17		9	2.046.234.374,00	9	3.000.000.000,00	9	3.600.000.000,00	9	3.960.000.000,00	9	4.356.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.03.2.01.0031 - Optimisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					50.000.000,00		700.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimasi (Unit)			1	50.000.000,00	1	700.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00							
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					5.316.830.000,00		10.545.500.000,00		10.827.250.000,00		11.598.000.000,00		11.910.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	532		817	5.316.830.000,00	1.834	10.545.500.000,00	1.883	10.827.250.000,00	1.933	11.598.000.000,00	1.985	11.910.000.000,00							
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,00		17.850.000.000,00		5.100.000.000,00		300.000.000,00		0,00							
Meningkatnya Keberfungsiang Tempat Pengelolaan Persampahan Regional	Percentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi (%)	-	-	42,86	0,00	57,14	17.850.000.000,00	71,43	5.100.000.000,00	85,71	300.000.000,00	100,00	0,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan						
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					0,00		17.850.000.000,00		5.100.000.000,00		300.000.000,00		0,00							
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimasi (Unit)				0,00	1	17.850.000.000,00		5.100.000.000,00	1	300.000.000,00		0,00							
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)					20		140												
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)					1		1		1										
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan					0,00		500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00			KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)				0,00	1	500.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					0,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00			KAB. BELITUNG			
Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)				0,00	1	200.000.000,00		0,00	1	200.000.000,00		0,00						
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R					0,00		17.150.000.000,00		5.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00	KAB. BELITUNG			
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)				0,00	20	17.150.000.000,00	140	5.000.000.000,00		0,00		0,00						
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.850.700.000,00		19.441.875.000,00		20.573.130.000,00		20.915.000.000,00		21.167.500.000,00						
Meningkatnya Ketersediaan Layanan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman (%)	-	2,36	2,51	1.850.700.000,00	5,71	19.441.875.000,00	8,91	20.573.130.000,00	12,11	20.915.000.000,00	15,31	21.167.500.000,00	1.03.1.04.0.00.01.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.850.700.000,00		19.441.875.000,00		20.573.130.000,00		20.915.000.000,00		21.167.500.000,00						
Meningkatnya rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	-	-		1.850.700.000,00	724	19.441.875.000,00	744	20.573.130.000,00	764,8	20.915.000.000,00	785,6	21.167.500.000,00						
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	-	-	2															
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M3/Hari)	-	-	28															
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00	KAB. BELITUNG			
Teroptimisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	-	-		0,00		0,00	1	500.000.000,00		0,00		0,00		0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					1.650.700.000,00		19.241.875.000,00		19.773.130.000,00		20.315.000.000,00		20.867.500.000,00		KAB. BELITUNG		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	-	-	28	1.650.700.000,00	724	19.241.875.000,00	744	19.773.130.000,00	764,8	20.315.000.000,00	785,6	20.867.500.000,00				
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		300.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	-	-	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	600.000.000,00	1	300.000.000,00				
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					899.040.000,00		614.800.000,00		609.960.000,00		614.800.000,00		614.800.000,00				
Meningkatnya kualitas drainase	Percentase drainase lingkungan dalam kondisi baik (%)	21,54	29,59	29,89	899.040.000,00	30,13	614.800.000,00	30,37	609.960.000,00	30,62	614.800.000,00	30,86	614.800.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan			
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					899.040.000,00		614.800.000,00		609.960.000,00		614.800.000,00		614.800.000,00				
Meningkatnya kapasitas saluran drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)				899.040.000,00	1	614.800.000,00	1	609.960.000,00	1	614.800.000,00	1	614.800.000,00				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)			1		1		1		1		1					
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)			4		1		1		1		1					
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)					1		1		1		1					
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.515		367		300		300		300		300					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	TARGET	PAGU												
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					325.040.000,00		257.400.000,00		257.400.000,00		257.400.000,00		257.400.000,00			KAB. BELITUNG	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.515		367	325.040.000,00	300	257.400.000,00	300	257.400.000,00	300	257.400.000,00	300	257.400.000,00				
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)			1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00				
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					0,00		85.800.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00			KAB. BELITUNG	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)				0,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00				
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					0,00		85.800.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00			KAB. BELITUNG	
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)				0,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00				
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					324.000.000,00		85.800.000,00		80.960.000,00		85.800.000,00		85.800.000,00			KAB. BELITUNG	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)			4	324.000.000,00	1	85.800.000,00	1	80.960.000,00	1	85.800.000,00	1	85.800.000,00				
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.410.472.810,00		2.900.000.000,00		6.100.000.000,00		6.265.000.000,00		1.400.000.000,00				
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar (%)	4,58	4,00	4,28	5.410.472.810,00	4,56	2.900.000.000,00	4,84	6.100.000.000,00	5,12	6.265.000.000,00	5,40	1.400.000.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					5.410.472.810,00		2.900.000.000,00		6.100.000.000,00		6.265.000.000,00		1.400.000.000,00				
Meningkatnya bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/SLF)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)			3	5.410.472.810,00	4	2.900.000.000,00	1	6.100.000.000,00	1	6.265.000.000,00	1	1.400.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)					1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				3		2		1		1		2							
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	61			200		150		150		150		150							
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1.767.200.000,00		2.000.000.000,00		400.000.000,00		565.000.000,00		500.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)			3	1.767.200.000,00	4	2.000.000.000,00	1	400.000.000,00	1	565.000.000,00	1	500.000.000,00						
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	KAB. BELITUNG			
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00						
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000,00		200.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			3	3.000.000.000,00	2	200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	2	200.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					643.272.810,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	61		200	643.272.810,00	150	600.000.000,00	150	600.000.000,00	150	600.000.000,00	150	600.000.000,00							
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00					
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan (%)	15,00	-	60,00	100.000.000,00	75,14	700.000.000,00	89,91	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	1.03.1.04.0.0.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan			
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00					
Tersedianya dokumen penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)				100.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00					
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		1		1		1		1		1		1						
	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)				50		50		50		50		50		50					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00							
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. BELITUNG			
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)				0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00							
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BELITUNG			
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)				0,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00							
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					51.961.911.891,00		286.044.890.000,00		210.091.424.000,00		126.423.931.000,00		156.186.725.000,00							
Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	-	86,66	86,94	51.961.911.891,00	87,23	286.044.890.000,00	87,52	210.091.424.000,00	87,80	126.423.931.000,00	88,09	156.186.725.000,00	100.100.000,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					51.961.911.891,00		286.044.890.000,00		210.091.424.000,00		126.423.931.000,00		156.186.725.000,00							
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	580,67		696,96	51.961.911.891,00	696,96	286.044.890.000,00	696,96	210.091.424.000,00	696,96	126.423.931.000,00	696,96	156.186.725.000,00							
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1								
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	17		5		10		1		1		1								
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	9		1		6		6		6		6								
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (KM)	667,066		696,96		696,96		696,96		696,96		696,96								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	13,41		5,49		38,65		17,31		4,70		11,38								
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	3,5				5,7		12,78		14,79										
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5,56		12,52		44,31		42,14		1,84		47,93								
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			18						85										
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan					119.552.000,00		40.252.000,00		40.252.000,00		40.252.000,00		40.252.000,00		KAB. BELITUNG					
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	119.552.000,00	1	40.252.000,00	1	40.252.000,00	1	40.252.000,00	1	40.252.000,00							
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					800.000.000,00		1.200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	17		5	800.000.000,00	10	1.200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00							
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan					610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (KM)	667,066		696,96	610.000.000,00	696,96	610.000.000,00	696,96	610.000.000,00	696,96	610.000.000,00	696,96	610.000.000,00							
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan					7.531.152.955,00		7.386.883.000,00		7.386.883.000,00		7.386.883.000,00		7.386.883.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	580,67		696,96	7.531.152.955,00	696,96	7.386.883.000,00	696,96	7.386.883.000,00	696,96	7.386.883.000,00	696,96	7.386.883.000,00							
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan					13.104.521.551,00		145.167.776.000,00		64.043.156.000,00		19.298.987.000,00		40.885.200.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	13,41		5,49	13.104.521.551,00	38,65	145.167.776.000,00	17,31	64.043.156.000,00	4,70	19.298.987.000,00	11,38	40.885.200.000,00							
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan					28.804.685.385,00		111.051.019.000,00		97.530.748.000,00		4.171.663.000,00		106.564.390.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5,56		12,52	28.804.685.385,00	44,31	111.051.019.000,00	42,14	97.530.748.000,00	1,84	4.171.663.000,00	47,93	106.564.390.000,00							
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan					200.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	9		1	200.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00		600.000.000,00	6	600.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar					0,00		19.988.960.000,00		39.780.385.000,00		61.391.146.000,00			0,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	3,5			0,00	5,7	19.988.960.000,00	12,78	39.780.385.000,00	14,79	61.391.146.000,00			0,00						
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan					792.000.000,00		0,00		0,00		32.725.000.000,00			0,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			18	792.000.000,00		0,00		0,00	85	32.725.000.000,00			0,00						
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					306.120.800,00		1.301.026.000,00		1.353.026.000,00		1.407.526.000,00			1.465.651.000,00						
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Percentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi (%)	-	16,67	33,33	306.120.800,00	50,00	1.301.026.000,00	66,67	1.353.026.000,00	83,33	1.407.526.000,00	100,00	1.465.651.000,00	1.03.10.00.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan						
	Percentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					67.998.800,00		242.000.000,00		242.000.000,00		242.000.000,00			242.000.000,00						
Meningkatnya kompetensi dasar tenaga terampil konstruksi melalui pelatihan bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	35		50	67.998.800,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00							
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					67.998.800,00		242.000.000,00		242.000.000,00		242.000.000,00			242.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	35		50	67.998.800,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00	75	242.000.000,00							
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					0,00		37.026.000,00		37.026.000,00		37.026.000,00			37.026.000,00						
Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)				0,00	1	37.026.000,00		37.026.000,00	1	37.026.000,00	1	37.026.000,00							
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					0,00		37.026.000,00		37.026.000,00		37.026.000,00			37.026.000,00		KAB. BELITUNG				
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)				0,00	1	37.026.000,00		37.026.000,00	1	37.026.000,00	1	37.026.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					238.122.000,00		1.022.000.000,00		1.074.000.000,00		1.128.500.000,00		1.186.625.000,00						
Tersedianya Laporan hasil pengawasan, penyeenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)			30	238.122.000,00	30	1.022.000.000,00	30	1.074.000.000,00	30	1.128.500.000,00	15	1.186.625.000,00						
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)					15		15		15		15							
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					0,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		29.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)				0,00	15	22.000.000,00	15	24.000.000,00	15	26.000.000,00	15	29.000.000,00						
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					238.122.000,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.102.500.000,00		1.157.625.000,00		KAB. BELITUNG				
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)			30	238.122.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.050.000.000,00	30	1.102.500.000,00	15	1.157.625.000,00						
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					209.240.000,00		1.955.000.000,00		1.943.000.000,00		1.986.000.000,00		2.001.000.000,00						
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)	-	100,00	100,00	209.240.000,00	100,00	1.955.000.000,00	100,00	1.943.000.000,00	100,00	1.986.000.000,00	100,00	2.001.000.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	-	51,82	67,24		69,28		70,12		77,79		81,12							
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					163.000.000,00		172.000.000,00		144.000.000,00		262.000.000,00		277.000.000,00						
Meningkatnya kepastian hukum, keterpaduan pembangunan, dan kualitas pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)				163.000.000,00	2	172.000.000,00	2	144.000.000,00	1	262.000.000,00	2	277.000.000,00						
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)					1		1		1		1							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1					1														
	1			1		1				1			1							
								1				1		1						
						1				1			1							
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					0,00		38.000.000,00			0,00		38.000.000,00		38.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)				0,00	1	38.000.000,00			0,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00						
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					0,00		20.000.000,00			0,00		0,00		0,00		KAB. BELITUNG				
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1			0,00	1	20.000.000,00			0,00		0,00		0,00						
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					163.000.000,00		70.000.000,00			0,00		90.000.000,00		95.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	163.000.000,00	1	70.000.000,00			0,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00						
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					0,00		20.000.000,00			20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)				0,00	2	20.000.000,00	2		20.000.000,00	1	10.000.000,00	2	20.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota					0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)				0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00							
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					0,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)				0,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00							
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					0,00		1.178.000.000,00		1.214.000.000,00		1.214.000.000,00		1.214.000.000,00							
Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang legal dan berkualitas	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)				0,00	1	1.178.000.000,00	1	1.214.000.000,00	1	1.214.000.000,00	1	1.214.000.000,00							
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1				1		1		1		1								
	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)					20		20		20		20								
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)				0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00							
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					0,00		914.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1			0,00	1	914.000.000,00	1	950.000.000,00	1	950.000.000,00	1	950.000.000,00							
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang					0,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)				0,00	20	64.000.000,00	20	64.000.000,00	20	64.000.000,00	20	64.000.000,00							
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					46.240.000,00		530.000.000,00		510.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00							
Tersedia Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)				46.240.000,00	1	530.000.000,00	1	510.000.000,00	1	430.000.000,00	1	430.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)			32		16		16		16		16							
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	2				1		1		1		1							
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					46.240.000,00		330.000.000,00		110.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Terlanyirnya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)			32	46.240.000,00	16	330.000.000,00	16	110.000.000,00	16	330.000.000,00	16	330.000.000,00						
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	KAB. BELITUNG			
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	2			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00						
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					0,00		150.000.000,00		350.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	KAB. BELITUNG			
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)				0,00	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00						
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00						
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00						
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1				1		1		1		1							
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	KAB. BELITUNG			
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1			0,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00							
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.133.498.900,00		18.081.789.000,00		19.371.989.000,00		20.762.997.000,00		23.990.493.000,00							
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					93.472.500,00		972.000.000,00		972.000.000,00		972.000.000,00		972.000.000,00							
Meningkatnya Layanan Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana (%)	-	-	11,11	93.472.500,00	33,33	972.000.000,00	55,56	972.000.000,00	77,78	972.000.000,00	100,00	972.000.000,00	100,00	1.03.1.04.0.0.01.0.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	Persentase Penyediaan Rumah layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program pemerintah (%)	-	-	-		25,00		50,00		75,00		100,00								
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00							
Tersedianya Dokumen perencanaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)				0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00							
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)					1				1			1							
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)					1			1			1								
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG			
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00						
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)				0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00						
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					93.472.500,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00				
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau Masyarakat yang di Relokasi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)			1	93.472.500,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00		612.000.000,00				
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)					2		2		2		2		2					
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)					2		2		2		2		2					
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)					2		2		2		2		2					
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					0,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)				0,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					93.472.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. BELITUNG		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)			1	93.472.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)				0,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00						
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					0,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)				0,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00	2	204.000.000,00						
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00				
Tersedianya laporan hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)				0,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00						
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KAB. BELITUNG		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)				0,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00						
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					492.000,00		1.420.000.000,00		1.300.600.000,00		1.169.860.000,00		2.701.846.000,00						
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh (%)	-	2,55	7,64	492.000,00	11,77	1.420.000.000,00	21,96	1.300.600.000,00	32,14	1.169.860.000,00	41,72	2.701.846.000,00	1.03.1.04.0.00.01.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					492.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00						
Tersedianya Laporan hasil Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)			1	492.000,00	1	66.000.000,00	1	72.600.000,00	1	79.860.000,00	1	87.846.000,00						
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum					492.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)			1	492.000,00	1	66.000.000,00	1	72.600.000,00	1	79.860.000,00	1	87.846.000,00						
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					0,00		330.000.000,00		180.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00						
Tersedianya dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)				0,00	1	330.000.000,00	1	180.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00						
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)					2													
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					0,00		300.000.000,00		150.000.000,00		0,00		0,00		KAB. BELITUNG				
Tersusun/Tereview/Terlegalisasi ya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)				0,00	2	300.000.000,00	1	150.000.000,00		0,00		0,00						
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)				0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00						
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					0,00		1.024.000.000,00		1.048.000.000,00		1.060.000.000,00		2.584.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)				0,00		1.024.000.000,00		1.048.000.000,00		1.060.000.000,00	6,5	2.584.000.000,00							
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)					12			12			12								
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)					1			1			1								
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					0,00		984.000.000,00		1.008.000.000,00		1.020.000.000,00		1.044.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)				0,00	12	984.000.000,00	12	1.008.000.000,00	12	1.020.000.000,00	12	1.044.000.000,00							
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)				0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00							
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					0,00		0,00		0,00		0,00		1.500.000.000,00		KAB. BELITUNG					
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)				0,00		0,00		0,00		0,00	6,5	1.500.000.000,00							
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					484.110.200,00		1.968.000.000,00		2.016.000.000,00		2.040.000.000,00		2.088.000.000,00							
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	-	3,85	7,69	484.110.200,00	30,77	1.968.000.000,00	53,85	2.016.000.000,00	76,92	2.040.000.000,00	100,00	2.088.000.000,00	1.03.1.04.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan						
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					484.110.200,00		1.968.000.000,00		2.016.000.000,00		2.040.000.000,00		2.088.000.000,00							
Meningkatnya kualitas hunian masyarakat melalui pengurangan rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	4		6	484.110.200,00	24	1.968.000.000,00	24	2.016.000.000,00	24	2.040.000.000,00	24	2.088.000.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					484.110.200,00		1.968.000.000,00		2.016.000.000,00		2.040.000.000,00		2.088.000.000,00		KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	4		6	484.110.200,00	24	1.968.000.000,00	24	2.016.000.000,00	24	2.040.000.000,00	24	2.088.000.000,00						
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.555.424.200,00		13.721.789.000,00		15.083.389.000,00		16.581.137.000,00		18.228.647.000,00						
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase PSU dalam Kondisi Baik (%)	48,42	-	42,31	3.555.424.200,00	47,52	13.721.789.000,00	52,73	15.083.389.000,00	57,94	16.581.137.000,00	63,14	18.228.647.000,00	1.03.1.04.0.00.01.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					3.555.424.200,00		13.721.789.000,00		15.083.389.000,00		16.581.137.000,00		18.228.647.000,00						
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap PSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)				3.555.424.200,00	2	13.721.789.000,00	2	15.083.389.000,00	2	16.581.137.000,00	2	18.228.647.000,00						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1				1		1		1		1							
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)					24		24		24		24							
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	38		30		12		12		12		12							
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)					14		14		14		14							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1			0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00							
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					0,00		1.899.547.000,00		2.089.502.000,00		2.298.452.000,00		2.528.297.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)				0,00	24	1.899.547.000,00	24	2.089.502.000,00	24	2.298.452.000,00	24	2.528.297.000,00							
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					0,00		7.242.000,00		7.387.000,00		7.535.000,00		7.685.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)				0,00	2	7.242.000,00	2	7.387.000,00	2	7.535.000,00	2	7.685.000,00							
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					0,00		3.795.000.000,00		4.174.500.000,00		4.591.950.000,00		5.051.145.000,00			KAB. BELITUNG				
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)				0,00	14	3.795.000.000,00	14	4.174.500.000,00	14	4.591.950.000,00	14	5.051.145.000,00							
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					3.555.424.200,00		7.920.000.000,00		8.712.000.000,00		9.583.200.000,00		10.541.520.000,00			KAB. BELITUNG				
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	38		30	3.555.424.200,00	12	7.920.000.000,00	12	8.712.000.000,00	12	9.583.200.000,00	12	10.541.520.000,00							

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
1	Program "KOTAKITA" (Kota Tertata, Inklusif, dan Tangguh)	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan 2. Optimalisasi Green Infrastruktur 3. Infrastruktur Jalan Ramah Disabilitas 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Berbasis pada Tata Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
		1. Peningkatan dan pemeliharaan Drainase 2. Optimalisasi Green Infrastruktur 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Berbasis pada Tata Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		1. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum 2. Optimalisasi Green Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air Limbah 2. Optimalisasi Green Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1. Peningkatan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 2. Optimalisasi Green Infrastruktur	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang	
2	Program "RUPAKOTA" (Revitalisasi dan Penataan Ruang Kota Terpadu)	1. Tersusunnya Rencana Tata Ruang 2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Tata Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Dasar Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
				Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas (Inklusif) 2. Meningkatnya Ketangguhan Bangunan/Infrastruktur (Tangguh)	Penataan Bangunan dan Gedung		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	1. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Meningkatnya Ketangguhan Bangunan/Infrastruktur (Tangguh)	Pengembangan Jasa Konstruksi		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
	Menurunnya Kawasan Kumuh	Kawasan Permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
3	Program "BANGUN LESTARI" (Pembangunan Infrastruktur Aksesibel dan Ramah Lingkungan Berkelanjutan)	Pembangunan Infrastruktur jalan pada wilayah sulit geografis Pembangunan Infrastruktur Drainase pada wilayah sulit geografis Pembangunan Infrastruktur air minum pada wilayah sulit geografis MPembangunan Infrastruktur air limbah pada wilayah sulit geografis Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada wilayah sulit geografis Pembangunan TPS, TPST dan TPS 3R	Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang	
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
4	Program "SIRAM" (Sumber Daya Air yang Ramah dan Berkelanjutan)	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Stasiun Pompa banjir Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Peningkatan Bangunan Perkuat Tebing	
				Pembangunan Breakwater	
				Peningkatan Tanggul Sungai	
				Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
				Pembangunan Unit Air Baku	
				Rehabilitasi Unit Air Baku	
				Pembangunan Tanggul Sungai	
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
				Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Rehabilitasi Embung	
				Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan	
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				P	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
5	Program "BERSIH" (Bangun Infrastruktur dengan Energi Ramah, Sehat, Inovatif, dan Hijau)	Meningkatnya bangunan dan gedung laik fungsi	Penataan Bangunan dan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang	
6	Program "TANGGUH BENCANA" (Tumbuh Tanggap, Unggul dalam Mitigasi Bencana)	Kesesuaian bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan konsep tata ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Rumah, Bangunan dan Gedung sesuai tata ruang dan tidak berada pada daerah rawan bencana	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Dasar Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM KEPMENDAGRI 900-1.2850	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan		
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		
			Penerbitan Izin dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode perencanaan sebelumnya secara umum telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator kinerja utama yang mengalami peningkatan meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian.

Pada aspek air minum, upaya yang telah dilakukan meliputi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik skala kota maupun desa, peningkatan kapasitas produksi instalasi air bersih, serta rehabilitasi jaringan distribusi. Dampak dari intervensi ini ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan pelayanan rumah tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Keterbatasan kapasitas sumber air baku, kondisi infrastruktur yang sudah tua, serta keterbatasan kemampuan operasional lembaga pengelola SPAM menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Pada aspek sanitasi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur sanitasi dilakukan melalui penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik, pembangunan tangki septic komunal, serta sistem drainase lingkungan. Upaya ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak, menurunnya praktik buang air besar sembarangan (BABS), serta membaiknya kualitas lingkungan permukiman. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan cakupan layanan instalasi pengolahan air limbah terpusat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, serta keterbatasan pembiayaan dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi.

Pada sub-urusan jalan dan jembatan, capaian kinerja ditunjukkan dengan meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan strategis. Hal ini turut memperkuat koneksi antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terhadap pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat sebagian ruas jalan dengan kondisi rusak ringan hingga berat yang memerlukan perbaikan maupun peningkatan kualitas.

Pada sub-urusan sumber daya air dan irigasi, telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta normalisasi sungai dan saluran drainase. Upaya ini berdampak positif terhadap meningkatnya keandalan pasokan air bagi sektor pertanian dan menurunnya potensi banjir di wilayah rawan. Meski demikian, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan, kerusakan jaringan irigasi akibat usia konstruksi, serta perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan sumber daya air.

Pada sub-urusan perumahan dan kawasan permukiman, kinerja ditunjukkan dengan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh serta meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak huni. Berbagai program pembangunan rumah layak huni, penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta penataan lingkungan permukiman telah dilaksanakan dengan capaian yang cukup signifikan. Kendati demikian, kebutuhan perumahan baru yang terus meningkat serta keterbatasan lahan di kawasan perkotaan masih menjadi isu strategis yang harus diatasi.

Pada sub-urusan penataan ruang, penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah telah dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Sosialisasi dan pengawasan pemanfaatan ruang juga telah berjalan untuk mewujudkan keteraturan dan kepatuhan terhadap RTRW. Akan tetapi, masih ditemui kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di lapangan, baik akibat lemahnya pengendalian maupun tekanan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Secara kelembagaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga ditopang oleh upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi mulai diterapkan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Meskipun demikian, tantangan ke depan berupa peningkatan kualitas SDM aparatur, efisiensi penggunaan anggaran, serta koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.



Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode sebelumnya telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, perumahan, dan penataan ruang di daerah. Namun, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dijawab dalam periode perencanaan mendatang, antara lain: keterbatasan pendanaan, kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, penguatan pemeliharaan aset, penegakan regulasi tata ruang, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman	%	44,73	53,02	55,31	57,68	60,32	62,78	
2	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	%	41,96	50,38	51,83	53,21	54,94	56,45	
3	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	55,85	63,58	69,26	75,55	81,84	88,07	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci
 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	63,94	64,15	64,53	64,67	64,90	65,27	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	0,00	2,59	2,62	2,67	2,70	2,78	



3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	52,75	53,05	53,46	53,67	53,96	54,11	
4	Percentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80,21	80,97	81,18	81,91	82,56	83,04	
5	Percentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,27	70,53	70,77	70,91	71,25	71,73	
6	Mengukur Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	89,31	89,57	90,32	90,61	91,03	91,46	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	52,99	57,05	61,81	65,33	69,36	73,78	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	%	0	11,11	33,33	55,56	77,78	100	
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	25	50	75	100	
12	Percentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	2,55	7,64	11,77	21,96	32,14	41,72	
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	17,26	17,19	17,11	17,03	16,95	16,88	
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	%	35,03	44,52	45,86	49,83	50,91	55,78	

Sumber : Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 (data diolah)



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan keterpaduan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang disusun secara terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan, serta analisis isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan instrumen perencanaan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan sinergi lintas sektor baik dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

3. Ketersediaan sumber daya, meliputi anggaran, sumber daya manusia, teknologi, serta dukungan regulasi yang memadai.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala untuk memastikan ketercapaian target serta memberikan dasar perbaikan kebijakan ke depan.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional maupun kondisi daerah. Oleh karena itu, dalam implementasinya diperlukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara berkesinambungan agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam Rencana strategis ini juga, perlu adanya Penambahan Bidang yaitu Bidang Bina Konstruksi yang merupakan bentuk respon strategis dan implementatif terhadap dinamika pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks serta kebutuhan peraturan yang berlaku. Dengan adanya bidang ini, diharapkan kualitas layanan publik di sektor konstruksi meningkat, pelaku jasa konstruksi lokal diberdayakan, dan pembangunan daerah lebih berkelanjutan serta efisien.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan terukur, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, penataan ruang, serta pelayanan publik di bidang pekerjaan umum. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

ל

א

ב

ג

ד

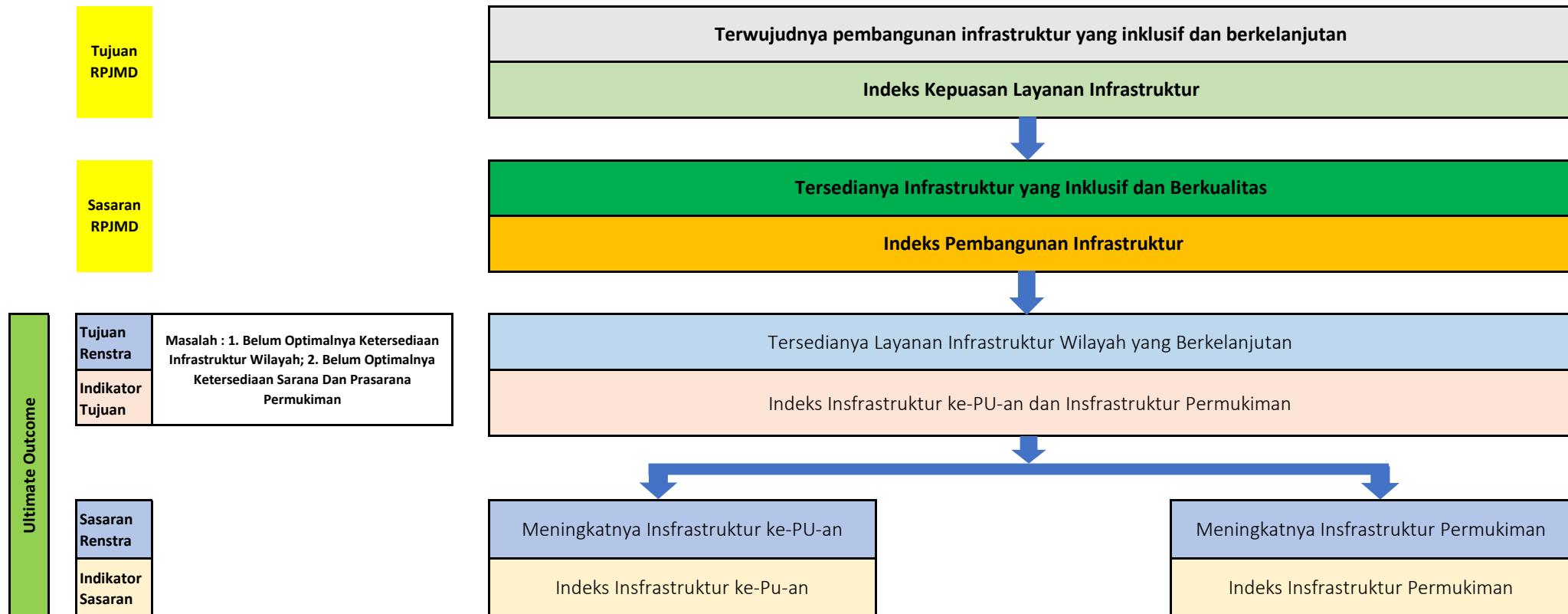
ה

ו

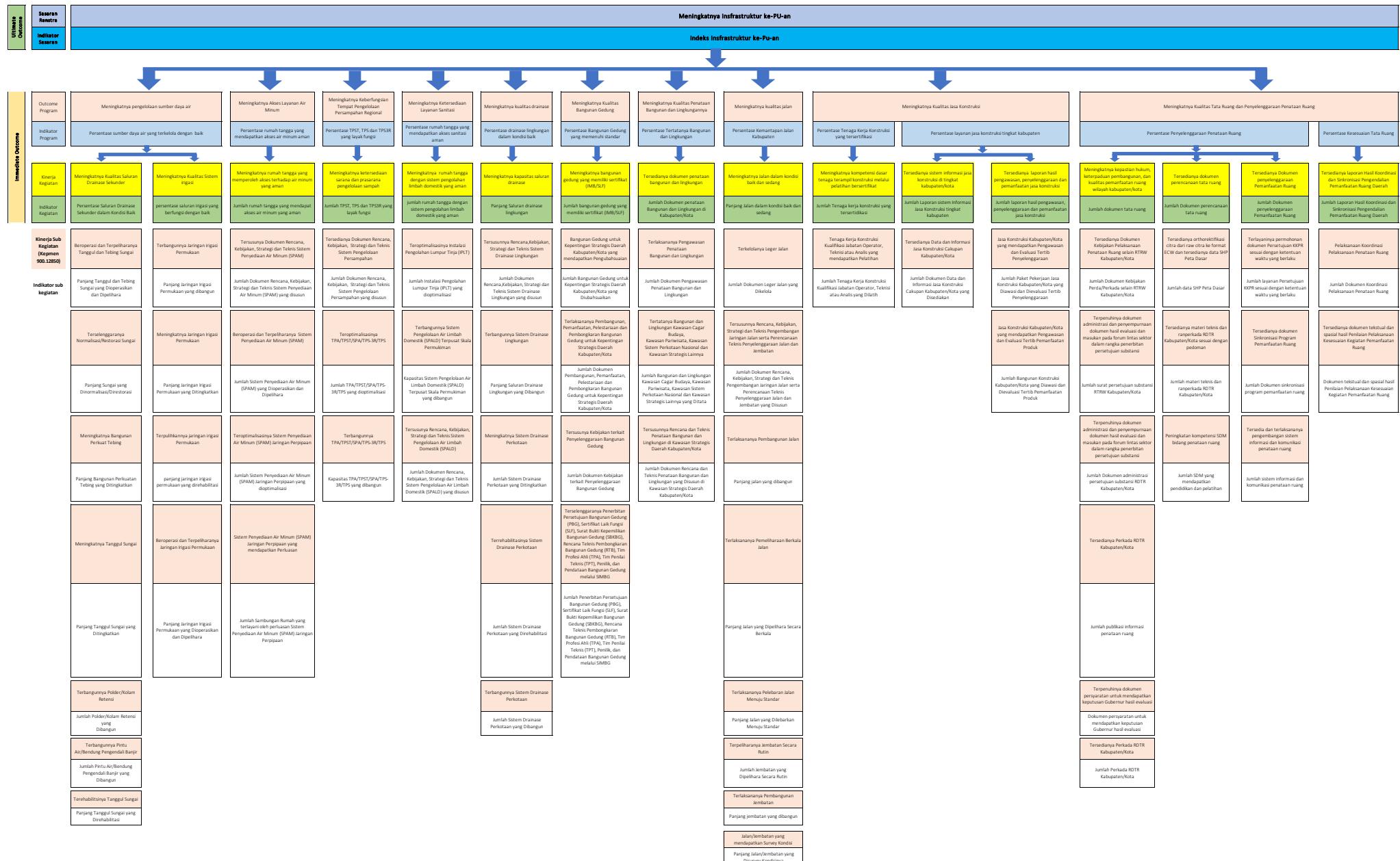
ז

python
kivy
PyQt
Qt

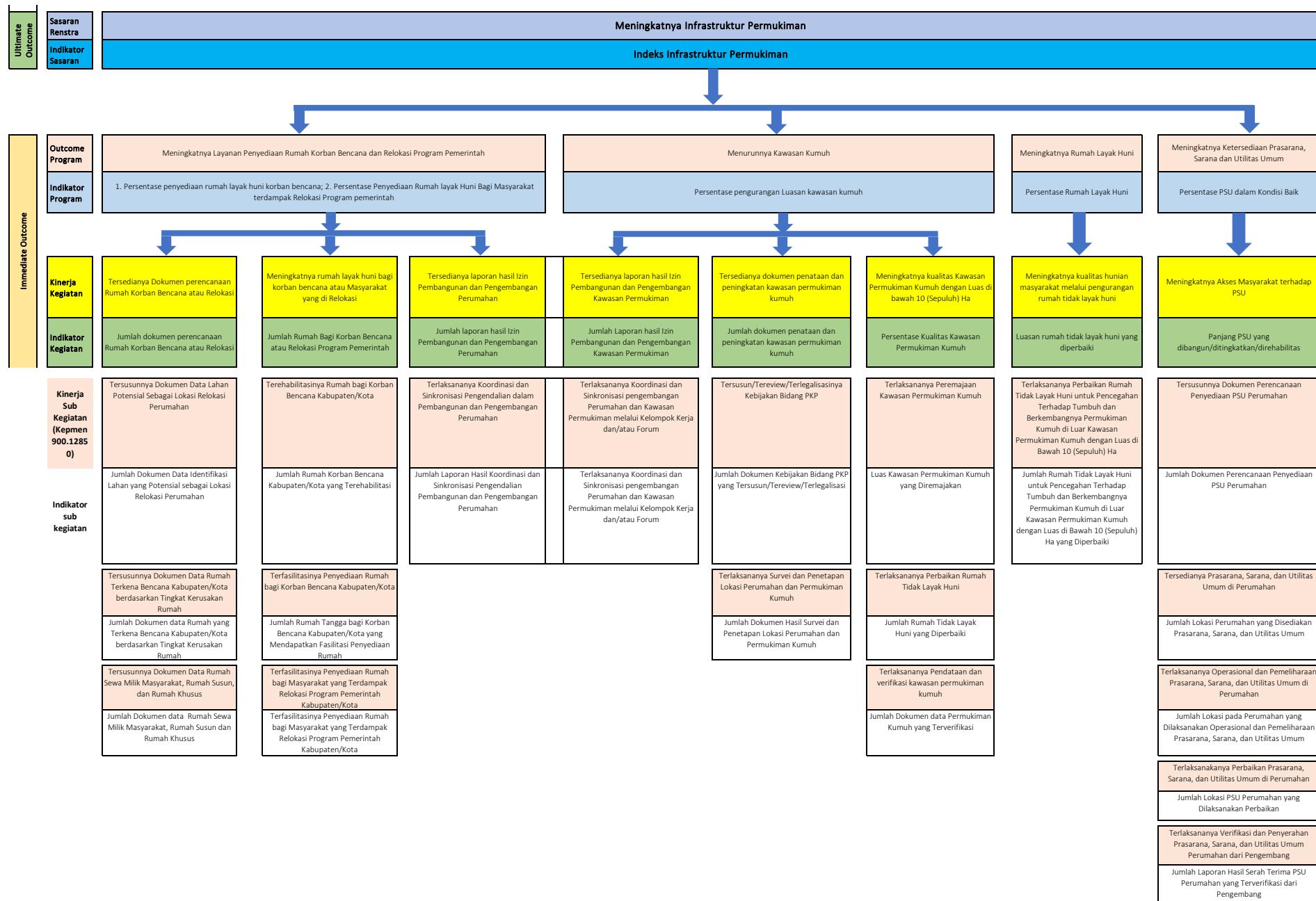
POHON KINERJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025-2029



POHON KINERJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029



POHON KINERJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029



CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029

הבר
הבר
הבר
הבר
הבר
הבר

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025-2029

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

Fungsi : 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, penyelenggaraan penataan ruang serta pembinaan jasa konstruksi;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	$(0,8 \times \text{Indeks Infrastruktur ke-PU-an}) + (0,2 \times \text{Indeks Infrastruktur Permukiman})$	<ul style="list-style-type: none"> • Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD-1 • SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten • Laporan monitoring dan evaluasi bina marga • Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air

				<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang • Laporan monitoring dan evaluasi keciptakaryaan • Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman • Laporan monitoring dan evaluasi jasa konstruksi
1.1	Meningkatnya Infrastruktur kePUan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	$(0,3 \times \text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten}) + (0,2 \times \text{sumber daya air terkelola dengan baik}) + (0,3 \times \text{terkelolanya keciptakaryaan dengan baik}) + (0,1 \times \text{penataan ruang}) + (0,1 \times \text{jasa konstruksi})$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = $(\text{Panjang jalan mantap kabupaten} / \text{Panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$ Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. b. Panjang jalan kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten yang sudah dilegalisasikan 2. Sumber daya air terkelola dengan baik = $(0,5 \times \text{saluran irigasi yang berfungsi dengan baik}) + (0,5 \times \text{saluran drainase sekunder dalam kondisi baik})$ Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Saluran irigasi yang berfungsi dengan baik = $(\text{Panjang Saluran Irigasi yang berfungsi baik sampai tahun n} / \text{Panjang Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten}) \times 100\%$ b. Saluran drainase sekunder dalam kondisi baik = $(\text{Panjang saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun n} / \text{Panjang saluran Drainase Sekunder wewenang Kabupaten}) \times 100\%$ 3. Terkelolanya keciptakaryaan dengan baik = $(0,4 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman}) + (0,2 \times \text{rumah tangga bersanitasi}) + (0,2 \times \text{drainase kondisi baik}) + (0,2 \times \text{persetujuan bangunan gedung})$ Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman = 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD-1 • SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten • Laporan monitoring dan evaluasi bina marga • Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air • Laporan monitoring evaluasi tata ruang • Laporan monitoring evaluasi keciptakaryaan • Laporan monitoring evaluasi jasa konstruksi

		<p>(Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman / Jumlah rumah tangga) x 100%</p> <p>b. Rumah bersanitasi = (Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang aman (sanitasi) / jumlah rumah tangga) x 100</p> <p>c. Drainase kondisi baik = (Panjang drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik / panjang drainase lingkungan keseluruhan) x 100%</p> <p>d. Persetujuan bangunan Gedung = (Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/PBG dan SLF) / Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung) x 100%</p> <p>4. Penataan ruang = (0,5 x Kesesuaian tata ruang) + (0,5 x Penyelenggaraan penataan ruang)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Kesesuaian Tata Ruang = (Luas Pola Ruang Kab. Belitung yang sesuai / Luas Total Pola Ruang Kab Belitung) x 100%</p> <p>b. Penyelenggaraan Penataan Ruang = (20% x Perencanaan Tata ruang) + (30% x Pengaturan Tata Ruang) + (20% x Pemanfaatan Ruang) + (30% x Pembinaan Ruang)</p> <p>5. Jasa Konstruksi = (0,4 x Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi) + (0,6 x layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten)</p> <p>a. Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikat = (jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat sampai tahun n / total jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat yang direncanakan) x 100%</p> <p>b. Layanan Jasa Konstruksi = (35% Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala + 10% Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + (10% Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + (10% Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya) + (10% Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala) + (15% Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan) + (10% Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota)</p>		
1.2	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	$(0,4 \times \text{jalan lingkungan}) + (0,3 \times \text{RTH}) + (0,1 \times \text{RTLH}) + (0,05 \times \text{RLH korban bencana}) + (0,05 \times \text{RLH bagi korban relokasi program kabupaten}) + (0,1 \times \text{Pengurangan Kawasan Kumuh})$	Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan Kawasan permukiman

		<p>Definisi Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan lingkungan = $(\text{Panjang jalan lingkungan kondisi baik sampai tahun n} / \text{total panjang jalan lingkungan}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> o Jalan lingkungan adalah jalan yang menuju akses perumahan atau permukiman dengan lebar dibawah 3,5 meter 2. RTLH = $(\text{Rumah Tidak Layak huni yang ditangani sampai tahun n} / \text{total rumah tidak layak huni}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Total rumah tidak layak huni yang ditentukan dan ditetapkan oleh perkada dalam periode renstra 3. RLH Korban korban bencana yang teranggarkan dan atau terlaksana 4. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yang teranggarkan dan atau terlaksana 5. RTH = $(\text{Luas Taman yang dikelola}) / \text{total luas taman keseluruhan} \times 100$ 6. Pengurangan Kawasan Kumuh = $(\text{luas kawasan kumuh yang tertangani sampai tahun n} / \text{total luas kawasan kumuh}) \times 100$ 	
--	--	--	--

TARGET UNTUK PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025 - 2030

No	Uraian	Koefisien	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	IKU PUPR = (0,8 x A) + (0,2 x B)		44,73	53,02	55,31	57,68	60,32	62,78
A	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	0,8	41,96	50,38	51,83	53,21	54,94	56,45
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	0,3	86,66	86,94	87,23	87,52	87,80	88,09
2	Sumber daya air terkelola dengan baik	0,2	22,15	22,58	23,00	23,43	23,86	24,29
3	Penataan ruang	0,1	75,91	83,62	84,64	85,06	88,90	90,56
4	Jasa konstruksi	0,1	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00
5	Terkelolaanya keciptakaryaan dengan baik	0,3	13,13	13,62	15,31	17,00	18,69	20,38
	- Rumah tangga air minum aman		16,56	17,81	20,84	23,87	26,90	29,94
	- Rumah tangga bersanitasi aman		2,36	2,51	5,71	8,91	12,11	15,31
	- Drainase kondisi baik		29,59	29,89	30,13	30,37	30,62	30,86
	- Persetujuan bangunan gedung		4,00	4,28	4,56	4,84	5,12	5,40
B	Indeks Infrastruktur Pemukiman	0,2	55,85	63,58	69,26	75,55	81,84	88,07
1	Jalan lingkungan	0,4	50,52	55,11	62,52	69,93	77,33	84,74
2	RTH	0,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	RLH korban bencana	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	RLH korban Program Pemerintah	0,05	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	RTLH	0,1	3,85	7,69	30,77	53,85	76,92	100,00
6	Pengurangan Kawasan Kumuh	0,1	2,55	7,64	11,77	21,96	32,14	41,72

DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN IKU

Kopmonen

: Sumber Daya Air Terkelola dengan Baik

RUMUS

: $(0,5 \times \text{saluran drainase sekunder dalam kondisi baik}) + (0,5 \times \text{Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik})$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (a+b)	22,15	22,58	23,00	23,43	23,86	24,29
saluran drainase sekunder dalam kondisi baik (a)	12,46	12,75	13,04	13,33	13,62	13,90
Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik (b)	9,69	9,83	9,97	10,11	10,24	10,38

Sub Komponen

: Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik

Rumus

: $(\text{Panjang saluran irigasi yang berfungsi dengan baik sampai tahun n} / \text{Panjang saluran irigasi wewenang kabupaten}) \times 100\%$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	19,37%	19,65%	19,93%	20,21%	20,49%	20,77%
Panjang Saluran Irigasi ditangani tahun n (km) (a)	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Saluran Irigasi yang berfungsi dengan baik sampai tahun n (b)	17,37	17,62	17,87	18,12	18,37	18,62
Panjang Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten (Km) (c)	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63

Sub Komponen

: Saluran drainase sekunder dalam kondisi baik

Rumus

: $(\text{Panjang saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun n} / \text{Panjang saluran drainase sekunder wewenang kabupaten}) \times 100\%$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	24,92%	25,50%	26,08%	26,65%	27,23%	27,81%
Saluran drainase sekunder yang di kerjakan pada tahun n (Km) (a)	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun n (Km) (b)	8,63	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63
Panjang saluran Drainase Sekunder wewenang Kabupaten (Km) (c)	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61

Saluran Drainase Sekunder Wewenang Kabupaten

No.	Nama Saluran	Panjang	Satuan
1	Saluran Siburik	5.618	m
2	Saluran Air Neruse	2.168	m
3	Saluran Air Berutak	2.299	m
4	Saluran Air Pancur	1.373	m
5	Saluran Air Kesembung	2.409	m
6	Saluran Air Saga (Jl. Pattimura)	1.502	m
7	Saluran Air Rayak	2.092	m
8	Saluran Dukong	2.535	m
9	Saluran embidaian	2.757	m
10	Saluran Membalong	1.181	m
11	Saluran aik bereje batu buding	1.115	m
12	Saluran di padang kandis	175	m
13	Saluran dusun bebute	2.539	m
14	Saluran Desa terong (area jl. dulhadi)	3.422	m
15	Saluran Aik rembikang	909	m
16	Saluran di Air Seruk	1.348	m
17	Saluran di Desa mentigi	1.177	m
	TOTAL	34.619	m
	TOTAL	34,61	Km

Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten

No	Nama Daerah Irigasi	Panjang	Satuan
1	Cerucuk	3.866,60	m
2	Gunung Riting	3.588,40	m
3	Mentigi	4.589,50	m
4	Simpang Rusa	4.621,50	m
5	Juru Seberang	2.958,60	m
6	Air Selumar	3.769,47	m
7	Tanjung Rusa	2.908,30	m
8	Air Gede	6.916,59	m
9	Sungai Padang	1.707,60	m
10	Batu Itam	2.215,00	m
11	Sabung	3.291,50	m
12	Kembiri	1.783,70	m
13	DI. Kelekak usang	1.455,70	m
14	DI. Keciput	579,00	m
15	DI. Sijuk	2.354,92	m
16	DI. Air Baik	4.749,00	m
17	DI. Air Gendang	4.483,10	m
18	DI. Kacang Butor	4.927,00	m
19	DI. Perpat	7.745,00	m
20	DI. Membalong	6.824,00	m
21	DI. Aik Mengkanang	1.569,50	m
22	DI. Ibul	1.746,00	m
23	DI. Rejomulyo	1.973,00	m
24	DI. Ambar Mandiri	2.197,00	m
25	DI. Bantan Aik Manda	2.587,00	m
26	DI. Bantan Karya Tani	2.773,00	m
27	DI. Bantan Sugak Ketakong	1.451,00	m
	TOTAL	89.630,98	m
	TOTAL	89,63	Km

Komponen	: Rumah Tangga Bersanitasi Aman
Rumus	: (Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang aman sampai tahun n / Jumlah rumah tangga) x 100%

URAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (P_a/P*100%)		2,36%	2,51%	5,71%	8,91%	12,11%	15,31%
Target rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik aman pada tahun n		35	97	1.811	1.861	1.912	1.964
Target total jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik aman sampai tahun n (Pal)	1.251	1.286	1.383	3.194	5.055	6.967	8.931
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung (P)		54.418	55.180	55.953	56.736	57.530	58.336

Komponen	: Rumah Tangga Air Minum Aman
Rumus	: (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sampai tahun n / jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung) x 100%

UARAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (P_{am}/P*100%)		16,56%	17,81%	20,84%	23,87%	26,90%	29,94%
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum yang aman pada tahun n (P _{amn})		941	817	1.834	1.883	1.933	1.985
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum yang aman sampai tahun n (P _{am})	8.070	9.011	9.828	11.662	13.545	15.478	17.463
Total Jumlah Rumah Tangga (RT) (P)		54.418	55.180	55.953	56.736	57.530	58.336

Sumber Data : BKKBN 2024, dimana 1 rumah sama dengan 1 rumah tangga

Komponen : Drainase Kondisi Baik
Rumus : (Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sampai tahun n / total panjang drainase lingkungan) x 100%

Komponen	: Persetujuan Bangunan Gedung
Rumus	: (Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/PBG dan SLF) sampai tahun n / Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung) x 100%

Sumber Data : BKKBN 2024

Komponen : Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
Rumus : (Panjang jalan Mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%

Komponen : Jasa Konstruksi

Sub Komponen	: Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi
Rumus	: (jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai tahun n / total jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi yang direncanakan) x 100%

Sub Komponen	: Layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten
Rumus	: (35% Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala + 10% Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya + 10% Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala + 15% Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan + 10% Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota)

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	100	100	100	100	100	100
Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan	100	100	100	100	100	100
Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100

Komponen : Penataan Ruang

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (0,5 x a) + (0,5 x b)	75,91%	83,62%	84,64%	85,06%	88,90%	90,56%
Persentase Kesesuaian Tata Ruang (a)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (b)	51,82	67,24	69,28	70,12	77,79	81,12

Sub Komponen	: Kesesuaian Tata Ruang
Rumus	: $(\text{Luas Pola Ruang Kab. Belitung yang sesuai} / \text{Luas Total Pola Ruang Kab Belitung}) \times 100\%$

Sub Komponen	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rumus	: 20% Perencanaan Tata Ruang + 30% Pengaturan Tata Ruang + 20% Pemanfaatan Ruang + 30% Pembinaan Ruang

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA	51,82	67,24	69,28	70,12	77,79	81,12
Perencanaan Tata Ruang	18,75	20,00	15,00	10,00	12,00	12,00
Pengaturan Tata Ruang	8,33	18,33	18,33	20,00	20,00	21,67
Pemanfaatan Ruang	13,24	13,24	19,12	19,12	19,12	19,12
Pembinaan Ruang	6,50	15,67	16,83	21,00	26,67	28,33

Komponen : Jalan Lingkungan
Rumus : (Panjang jalan lingkungan yang tertangani sampai tahun n / panjang jalan lingkungan) x 100%

URAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)		50,52	55,11	62,52	69,93	77,33	84,74
Panjang jalan lingkungan yang tertangani pada tahun n (km) (a)		2,76	1,86	3,00	3,00	3,00	3,00
Panjang jalan lingkungan yang tertangani sampai tahun n (km) (b)	17,70	20,46	22,32	25,32	28,32	31,32	34,32
Total panjang jalan lingkungan (c)		40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5

Komponen	: Rumah Tidak Layak Huni
Rumus	: (RTLH yang tertangani sampai tahun n / Total RTLH) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	-	7,69	30,77	53,85	76,92	100,00
RTLH yang tertangani pada tahun n (unit) (a)	6	6	36	36	36	36
RTLH yang tertangani sampai tahun n (unit) (b)		12	48	84	120	156
Total RTLH Tahun Perencanaan (unit) (c)	156	156	156	156	156	156

Komponen : Pengurangan Kawasan Kumuh
Rumus : (total kawasan kumuh yang ditangani sampai tahun / Total Kawasan Kumuh) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	2,55	7,64	11,77	21,96	32,14	41,72
Kawasan Kumuh yang ditangani pada tahun n (a)	0,50	1,00	1,31	2,00	2,00	1,88
total kawasan kumuh yang ditangani sampai tahun n (b)	0,50	1,50	2,31	4,31	6,31	8,19
Total Kawasan Kumuh (c)	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63

Komponen : Ruang Terbuka Hijau (Taman)
Persentase : (Luas RTU yang ditangani / Luas Total RTU) x 100%

Deutsche
Bundes
Rat
für
Qualität
und
Erneuerung

**DEFINISIN OPERASIONAL PROGRAM
RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR KAB. BELITUNG TAHUN 2025-2029**

PROGRAM	: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik
RUMUS	: $(0,5 \times \text{Persentase saluran drainase sekunder dalam kondisi baik}) + (0,5 \times \text{Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik})$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (a+b)	22,15	22,58	23,00	23,43	23,86	24,29
Persentase saluran drainase sekunder dalam kondisi baik (a)	12,46	12,75	13,04	13,33	13,62	13,90
Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik (b)	9,69	9,83	9,97	10,11	10,24	10,38

KEGIATAN : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KEGIATAN : Persentase Saluran Irigasi yang Berfungsi dengan Baik

RUMUS : $(\text{Panjang saluran irigasi yang berfungsi dengan baik sampai tahun n} / \text{Panjang saluran irigasi wewenang kabupaten}) \times 100\%$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	19,37%	19,65%	19,93%	20,21%	20,49%	20,77%
Panjang Saluran Irigasi ditangani tahun n (km) (a)	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Saluran Irigasi yang berfungsi dengan baik sampai tahun n (b)	17,37	17,62	17,87	18,12	18,37	18,62
Panjang Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten (Km) (c)	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63

KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KEGIATAN : Persentase saluran drainase sekunder dalam kondisi baik

RUMUS : $(\text{Panjang saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun n} / \text{Panjang saluran drainase sekunder wewenang kabupaten}) \times 100\%$

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	24,92%	25,50%	26,08%	26,65%	27,23%	27,81%
Saluran drainase sekunder yang di kerjakan pada tahun n (Km) (a)	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun n (Km) (b)	8,63	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63
Panjang saluran Drainase Sekunder wewenang Kabupaten (Km) (c)	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61

Saluran Drainase Sekunder Wewenang Kabupaten

No.	Nama Saluran	Panjang	Satuan
1	Saluran Siburik	5.618	m
2	Saluran Air Neruse	2.168	m
3	Saluran Air Berutak	2.299	m
4	Saluran Air Pancur	1.373	m
5	Saluran Air Kesembung	2.409	m
6	Saluran Air Saga (Jl. Pattimura)	1.502	m
7	Saluran Air Rayak	2.092	m
8	Saluran Dukong	2.535	m
9	Saluran embidaian	2.757	m
10	Saluran Membalong	1.181	m
11	Saluran aik bereje batu buding	1.115	m
12	Saluran di padang kandis	175	m
13	Saluran dusun bebute	2.539	m
14	Saluran Desa terong (area jl. dulhadi)	3.422	m
15	Saluran Aik rembikang	909	m
16	Saluran di Air Seruk	1.348	m
17	Saluran di Desa mentigi	1.177	m
	TOTAL	34.619	m
	TOTAL	34,61	Km

Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten

No	Nama Daerah Irigasi	Panjang	Satuan
1	Cerucuk	3.866,60	m
2	Gunung Riting	3.588,40	m
3	Mentigi	4.589,50	m
4	Simpang Rusa	4.621,50	m
5	Juru Seberang	2.958,60	m
6	Air Selumar	3.769,47	m
7	Tanjung Rusa	2.908,30	m
8	Air Gede	6.916,59	m
9	Sungai Padang	1.707,60	m
10	Batu Itam	2.215,00	m
11	Sabung	3.291,50	m
12	Kembiri	1.783,70	m
13	DI. Kelekak usang	1.455,70	m
14	DI. Keciput	579,00	m
15	DI. Sijuk	2.354,92	m
16	DI. Air Baik	4.749,00	m
17	DI. Air Gendang	4.483,10	m
18	DI. Kacang Butor	4.927,00	m
19	DI. Perpat	7.745,00	m
20	DI. Membalong	6.824,00	m
21	DI. Aik Mengkanang	1.569,50	m
22	DI. Ibul	1.746,00	m
23	DI. Rejomulyo	1.973,00	m
24	DI. Ambar Mandiri	2.197,00	m
25	DI. Bantan Aik Manda	2.587,00	m
26	DI. Bantan Karya Tani	2.773,00	m
27	DI. Bantan Sugak Ketakong	1.451,00	m
	TOTAL	89.630,98	m
	TOTAL	89,63	Km

PROGRAM	: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman
RUMUS	: $(\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sampai tahun n} / \text{jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}) \times 100\%$

UARAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (P_{am}/P*100%)		16,56%	17,81%	20,84%	23,87%	26,90%	29,94%
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum yang aman pada tahun n (P _{amn})		941	817	1.834	1.883	1.933	1.985
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum yang aman sampai tahun n (P _{am})	8.070	9.011	9.828	11.662	13.545	15.478	17.463
Total Jumlah Rumah Tangga (RT) (P)		54.418	55.180	55.953	56.736	57.530	58.336

PROGRAM	: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi
RUMUS	: (Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang aman sampai tahun n / Jumlah rumah tangga) x 100%

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (P_{al}/P*100%)	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%
TPS, TPST dan TPS3R yang layak fungsi pada tahun n	-	1	1	1	1
TPS, TPST dan TPS3R yang layak fungsi sampai tahun n	3	4	5	6	7
Total TPS, TPST dan TPS3R	7	7	7	7	7

PROGRAM	: PENGELOLAAN DAN PENEGBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Rumah Tangga dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Aman
RUMUS	: $(\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang aman sampai tahun n} / \text{Jumlah rumah tangga}) \times 100\%$

URAIAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (P_{al}/P*100%)		2,36%	2,51%	5,71%	8,91%	12,11%	15,31%
Target rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik aman pada tahun n		35	97	1.811	1.861	1.912	1.964
Target total jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik aman sampai tahun n (Pal)	1.251	1.286	1.383	3.194	5.055	6.967	8.931
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung (P)		54.418	55.180	55.953	56.736	57.530	58.336

Sumber Data : BKKBN 2024, dimana 1 rumah sama dengan 1 rumah tangga

PROGRAM	: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik
RUMUS	: (Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sampai ta 100%

PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

INDIKATOR PROGRAM : Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar

RUMUS : (Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/SLF) sampai tahun n / Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung) x 100%

Sumber Data : BKKBN 2024

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten

RUMUS $(\text{Panjang jalan Mantap kabupaten} / \text{Panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$

PROGRAM : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

INDIKATOR PROGRAM : Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi

RUMUS : (jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai tahun n / total jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi yang direncanakan) x 100%

PROGRAM	: PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten (35% Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala + 10% Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya + 10% Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala + 15% Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan + 10% Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota)
RUMUS	

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	100	100	100	100	100	100
Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	100	100	100	100	100	100
Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan	100	100	100	100	100	100
Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Kesesuaian Tata Ruang
RUMUS	: (Luas Pola Ruang Kab. Belitung yang sesuai / Luas Total Pola Ruang Kab Belitung) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (a/b)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Luas Pola Ruang Kab. Belitung yang sesuai (a)	229.369	229.369	229.369	229.369	229.369	229.369
Luas Total Pola Ruang Kab Belitung (b)	229.369	229.369	229.369	229.369	229.369	229.369

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
INDIKATOR PROGRAM	: Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang
RUMUS	: 20% Perencanaan Tata Ruang + 30% Pengaturan Tata Ruang + 20% Pemanfaatan Tata Ruang + 30% Pembinaan Ruang

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA	51,82	67,24	69,28	70,12	77,79	81,12
Perencanaan Tata Ruang	18,75	20,00	15,00	10,00	12,00	12,00
Pengaturan Ruang	8,33	18,33	18,33	20,00	20,00	21,67
Pemanfaatan Ruang	13,24	13,24	19,12	19,12	19,12	19,12
Pembinaan Ruang	6,50	15,67	16,83	21,00	26,67	28,33

KOMPONEN : PENGEMBANGAN PERUMAHAN
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana
RUMUS : (Penyediaan RLH Korban Bencana sampai tahun n / Total Rencana Penyediaan RLH Korban Bencana) x 100%

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	11,11	33,33	55,56	77,78	100,00
Penyediaan RLH Korban Bencana pada tahun n (unit rumah) (a)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penyediaan RLH Korban Bencana sampai tahun n (unit rumah) (b)	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Total Rencana Penyediaan RLH Korban Bencana (unit rumah) (c)	9	9	9	9	9

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN
INDIKATOR PROGRAM : Persentase Penyediaan Rumah layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program pemerintah
RUMUS : (Penyediaan RLH Relokasi Program Pemerintah sampai tahun n / Total Rencana Penyediaan RLH Relokasi Program Pemerintah) x 100%

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	-	25,00	50,00	75,00	100,00
Penyediaan RLH Relokasi Program Pemerintah pada tahun n (unit rumah) (a)	-	2,00	2,00	2,00	2,00
Penyediaan RLH Relokasi Program Pemerintah sampai tahun n (unit rumah) (b)	-	2,00	4,00	6,00	8,00
Total Rencana Penyediaan RLH Relokasi Program Pemerintah (unit rumah) (c)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh
RUMUS : (total kawasan kumuh yang ditangani sampai tahun n / Total Kawasan Kumuh) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	2,55	7,64	11,77	21,96	32,14	41,72
Kawasan Kumuh yang ditangani pada tahun n (a)	0,50	1,00	1,31	2,00	2,00	1,88
total kawasan kumuh yang ditangani sampai tahun n (b)		1,50	2,31	4,31	6,31	8,19
Total Kawasan Kumuh (c)	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63

PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
INDIKATOR PROGRAM : Persentase Rumah Layak Huni
RUMUS : (RTLH yang tertangani sampai tahun n / Total RTLH) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (b/c*100%)	3,85	7,69	30,77	53,85	76,92	100,00
RTLH yang tertangani pada tahun n (unit) (a)	6	6	36	36	36	36
RTLH yang tertangani sampai tahun n (unit) (b)	6	12	48	84	120	156
Total RTLH Tahun Perencanaan (unit) (c)	156	156	156	156	156	156

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

INDIKATOR PROGRAM : Persentase PSU dalam Kondisi Baik

RUMUS : (Luas PSU yang ditangani sampai tahun n / Total luas PSU yang dikelola) x 100%

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TARGET RENSTRA (a/b*100%)		42,31	47,52	52,73	57,94	63,14
Luas PSU yang ditangani pada tahun n (m2) (a)		14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Luas PSU yang ditangani sampai tahun n (m2) (b)	100.169,37	114.229,37	128.289,37	142.349,37	156.409,37	170.469,37
Total luas PSU yang dikelola (m2) (c)		269.969,37	269.969,37	269.969,37	269.969,37	269.969,37